



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

# "ANALISIS PENGARUH PDRB, APBD DAN ANGKATAN KERJA TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT"

**SKRIPSI**



**VIVI EKA SARI**  
**07151003**

**PROGRAM STUDI EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2011**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.....

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, salawat dan salam disampaikan kepada Rasulullah SAW, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya dan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Analisis Pengaruh PDRB, APBD dan Angkatan Kerja terhadap Kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat”**. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan justru awal dari perjuangan panjang dalam meraih masa depan. Untuk itu penulis mengharapkan banyak dukungan dan do'a restu dari pembaca semua agar perjuangan ini masih dapat terus berlanjut.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghormatan yang dalam kepada:

1. Bapak Masrizal, Drs, M.Soc.Sc selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Lukman, SE.M.Si dan Ibu Leli Sumarni, Dra, MS, M.Si selaku pembahas skripsi yang telah banyak memberikan saran, pendapat, serta dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Firwan Tan selaku Ketua Jurusan Ekonomi Universitas Andalas.

4. Bapak Prof. Dr. Syafruddin Karimi selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
5. Bapak Amra Ausri, Drs, M.Si selaku Pembimbing Akademik penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengajaran kepada penulis.
7. Bapak Febriandi Putra, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi ekonomi pembangunan jurusan ilmu ekonomi.
8. Uni Nel, Pak Asman, Da Jang, Ibu Sam, Ibu Nini di Biro Jurusan Ekonomi serta seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Special buat Evan Vernando yang telah memberikan semangat, dorongan, motivasi dan menemani selama ini kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman angkatan '07 Ayu, Mitha dan Tia (cepat-cepat menyusul ya), teman satu bimbingan akademik (Redha), Firman Hidayat, Yudha, Hajal, Amir, Mahlil, Oki, Yelma, Inel, Melfa, Mike, Wiwit, Febbi, Rita Wahyuni, Aan, Izul, Andri Hidayat, Adi, Andri, Anes, Reno, Ina, Anggi, Ica, Trisyya, Kak Maya, Imenk, Farid, Jimmy, Teja dan untuk teman-teman yang telah wisuda duluan (Tessa, Mira, Jefry, Andi) dan teman-teman Ilmu ekonomi lainnya yang tidak dapat penulis tuliskan satu, penulis ucapkan terima kasih atas pertemanannya selama ini.
11. Untuk Uda-Uda, Uni-Uni dan Adik-Adik Ilmu Ekonomi dari Angkatan berapapun, penulis Ucapkan terima kasih atas bantuannya selama ini.

12. Teman-teman sekost-ku Feny, Ayu, Diyan, Livi, Ai, Yuni, penulis ucapkan terima kasih atas bantuannya selama ini.
13. Teman-teman KKN-ku Kudil (Dila), Marola (Dola), Hotmen dan Andra senang bisa kenal kalian. Pengalaman, suka duka dan kenangan bersama kalian menjadikan inspirasi bagiku.
14. Untuk teman baikku dan seluruh teman-temanku di waktu SD, SMP, SMA, serta khususnya untuk Guru-guruku terima kasih yang sebesar-besarnya atas pelajaran tentang hidup ini.
15. Kemudian untuk semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, semangat dan doa kepada penulis dan penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan dan bagi kita semua. Bagaimanapun juga dari Allah SWT semuanya bermula dan kepada Allah jugalah kita kembali. Semoga ridha Allah selalu menyertai kita. Amin amin ya robbilalamin, assalamuallaikum warrahmatullahiwabarakatuh.

Padang, Agustus 2011

Penulis

(Vivi Eka Sari)

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>9</b>
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Kemiskinan.....	9
2.1.2 Pertumbuhan Penduduk.....	17
2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi.....	21
2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	29

2.1.5 Angkatan Kerja.....	33
2.2. Hubungan Antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen.....	38
2.2.1 Pengaruh PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan.....	38
2.2.2 Pengaruh APBD terhadap Kemiskinan.....	40
2.2.3 Pengaruh Angkatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan.....	42
2.3. Penelitian Terdahulu.....	44
2.4. Kerangka Pemikiran.....	46
2.3. Hipotesis.....	47
<b>BAB III Metodologi Penelitian.....</b>	<b>49</b>
3.1. Jenis dan Sumber Data.....	49
3.2. Pembentukan Model.....	50
3.3. Variabel Penelitian dan definisi Operasional .....	53
3.4 Metode Analisis.....	56
3.4.1 Analisis Deskriptif.....	56
3.4.2 Analisis Induktif.....	56
3.5. Uji Statistik.....	57
3.5.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t).....	57
3.5.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	58

3.5.1 Uji Signifikansi Determinasi (Uji $R_2$ ).....	59
<b>BAB IV Gambaran Umum .....</b>	<b>61</b>
4.1. Deskripsi Objek Penelitian .....	61
4.1.1 Kondisi Geografis.....	61
4.2. Analisis Data .....	62
4.2.1 Kemiskinan .....	64
4.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	66
4.2.3 Angkatan Kerja .....	69
<b>BAB V Analisis dan Pembahasan .....</b>	<b>73</b>
5.1. Analisis Regresi .....	73
5.1.1 Interpretasi Hasil Penelitian .....	73
5.1.2 Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t) .....	75
5.1.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) ... ..	77
5.1.4 Uji Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ ) ... ..	77
5.2. Implikasi Kebijakan.....	79

<b>BAB VI Kesimpulan dan Saran .....</b>	<b>80</b>
6.1. Kesimpulan .....	80
6.2. Keterbatasan .....	81
6.1. Saran .....	81

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Pertumbuhan Kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2000-2009.....	3
Tabel 4.1	: Luas Wlayah Per kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat .....	62
Tabel 4.2	: Persentase Kemiskinan di kabupaten Pasaman Barat Tahun 2000-2009 .....	63
Tabel 4.3	: PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2000 di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2000-2009.....	64
Tabel 4.4	: Belanja Langsung di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2000-2009.....	68
Tabel 4.4	: Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2000-2009 .....	71
Tabel 5.1	: Hasil Regresi Linier Berganda Antara Variabel Independent (PDRB, APBD dan Angkatan Kerja) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat.....	73
Tabel 5.2	: Koefisien Korelasi PDRB, APBD dan Angkatan Kerja terhadap Kemiskinan di Kabupetan Pasaman Barat.....	78

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Pengaruh Pertumbuhan terhadap Tingkat Kesejahteraan Menurut Nelson dan Leibstein ..... 20



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk menjadi tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif mempunyai kemiskinan yang terus naik dari tahun ke tahun. Sekarang ini pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat juga sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan daerah di berbagai bidang. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin (Pantjar Simatupang dan Saktyanu K, 2003).

Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih

..

jauh dari yang diharapkan dari beberapa penanggulangan kemiskinan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Permasalahan strategis di pemerintahan kabupaten Pasaman Barat tidak jauh berbeda dengan di pemerintahan pusat (problem nasional). Oleh karena itu, kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan, untuk segera mencari jalan keluar dengan merumuskan langkah-langkah yang sistematis dan strategis sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Di Kabupaten Pasaman Barat pertumbuhan rata-rata kemiskinan dari tahun 2000-2009 mencapai 2,12%. Jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat meningkat akibat jumlah penduduk dalam angkatan kerja meningkat yang tidak di iringi dengan ketersediaan lapangan kerja, sehingga pengangguran di Kabupaten Pasaman Barat meningkat yang mengakibatkan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat juga mengalami peningkatan.

**Tabel 1.1 Pertumbuhan Kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun 2000 – 2009 (dalam satuan persen)**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Persentase Kemiskinan</b>	<b>Jumlah Angka kemiskinan</b>	<b>Pertumbuhan Kemiskinan (%)</b>
2000	316621	22%	66059	-
2001	316653	22%	68067	3,04
2002	316685	22%	70175	3,09
2003	316717	22%	71409	1,76
2004	320559	23%	72283	1,21
2005	328655	22%	73428	1,58
2006	336003	23%	75744	3,15
2007	327787	23%	76960	1,65
2008	333192	24%	78499	1,99
2009	338567	24%	79766	1,61
<b>Pertumbuhan Rata-rata</b>				2,12

*Sumber: Pasaman Barat Dalam Angka tahun 2003-2009*

Menurut Lincoln Arsyad (1997), pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Ada beberapa faktor mengapa hal tersebut lebih menonjol atau penting bagi negara berkembang. Pertama, pertumbuhan penduduk di negara berkembang cenderung tinggi, sehingga cenderung melebihi pertumbuhan kapital. Kedua, demografi profil lebih muda, sehingga lebih banyak penduduk yang masuk ke lapangan kerja. Ketiga, struktur industri di negara berkembang, yang cenderung mempunyai tingkat diversifikasi kegiatan ekonomi rendah, serta tingkat keterampilan penduduk yang belum memadai, membuat usaha penciptaan lapangan kerja menjadi semakin kompleks.

◦ Selanjutnya menurut Michael P. Todaro (2000), tingginya angka kelahiran dapat menjadikan beban tanggungan bagi angkatan kerja produktif. Hal ini dianggap sebagai penyebab pokok terjadinya kemiskinan, standar hidup yang rendah (pendapatan rendah, fasilitas perumahan tidak memadai, pendidikan terbatas, kematian tinggi, umur pendek, harapan kosong, perasaan kacau dan putus asa), kekurangan gizi, kesehatan yang buruk, degradasi lingkungan dan masalah sosialnya.

Menurut Micheal P. Todaro (2000), pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi semua negara di dunia sekarang ini. Pemerintah di negara manapun dapat segera jatuh atau bangun berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapainya dalam catatan statistik nasional. Berhasil tidaknya program-program di negara-negara dunia ketiga sering dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat output dan pendapatan nasional.

Pada hakekatnya pembangunan daerah dianjurkan tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi saja namun juga mempertimbangkan bagaimana kemiskinan yang dihasilkan dari suatu proses pembangunan daerah tersebut. Menurut Esmara (dikutip dari Deni Tisna, 2008) dalam ilmu ekonomi dikemukakan berbagai teori yang membahas tentang bagaimana pembangunan ekonomi harus ditangani untuk mengejar keterbelakangan. Kemiskinan merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup (*Word Bank*, 2004). Menurut Bank Dunia salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and*

*assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan.

Di samping itu, masalah kemiskinan juga berkaitan dengan Pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan (Ardi Hamzah, 2006).

Selanjutnya anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi, dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang, ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja. Anggaran sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Menurut Gazi Mainul Hassan (2005), dalam analisisnya tentang bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan. Penelitiannya menemukan

bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, yang artinya bahwa semakin banyak pengeluaran pemerintah maka akan mengurangi kemiskinan.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**ANALISIS PENGARUH PDRB, APBD DAN ANGKATAN KERJA TERHADAP KEMISKINAN di KABUPATEN PASAMAN BARAT**”.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan kondisi di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat?
3. Bagaimana pengaruh angkatan kerja terhadap kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan pada bagian perumusan masalah di atas, yaitu:

1. Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Menganalisis pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat.
3. Menganalisis pengaruh angkatan kerja terhadap kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat.

### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Agar pembahasan lebih terarah, maka perlu dibatasi ruang lingkup pembahasan. Dimana, terdapat dua ruang lingkup dalam penelitian ini, yaitu ruang lingkup studi dan ruang lingkup wilayah. Yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah pengaruh PDRB, APBD dan angkatan kerja terhadap kemiskinan. Dan ruang lingkup penelitian ini adalah di Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam mengukur kemiskinan di Kabupaten Pasaman barat diperlukan data-data dari tiga variable yaitu: Pengaruh PDRB, APBD dan angkatan kerja.

## 1.5 Manfaat Penelitian

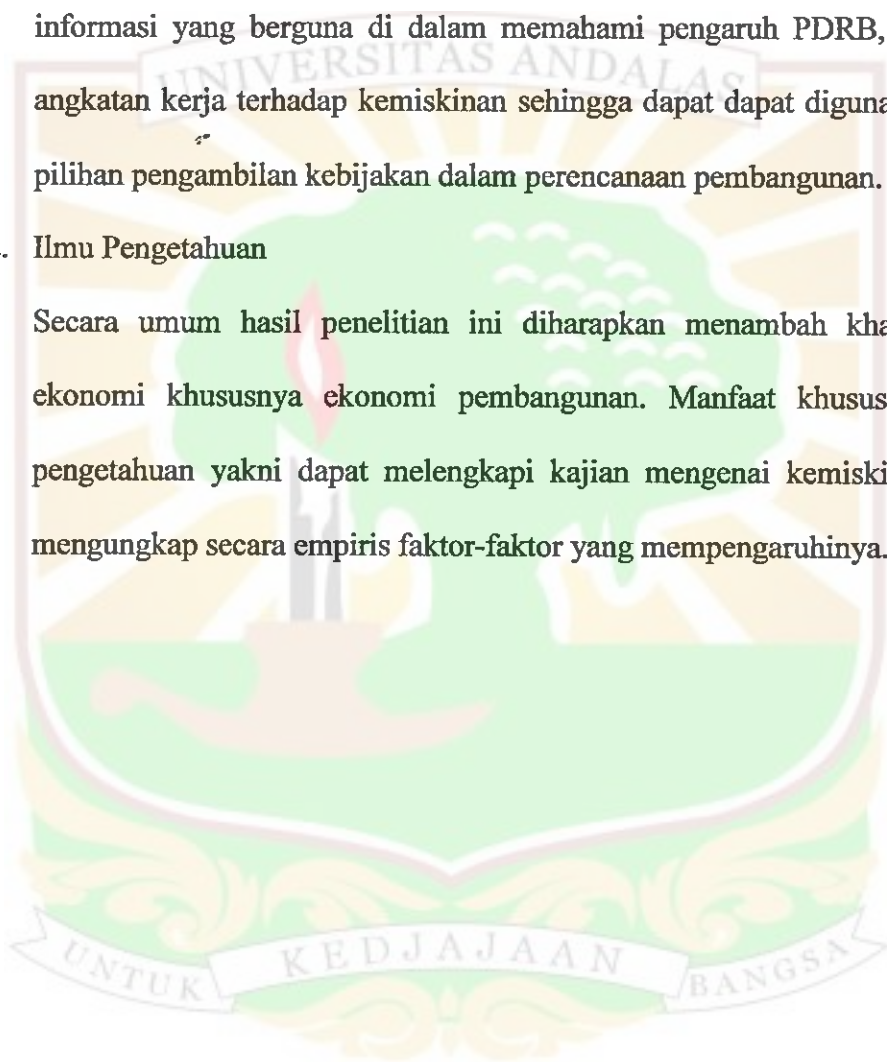
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

### 1. Pengambil Kebijakan

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna di dalam memahami pengaruh PDRB, APBD dan angkatan kerja terhadap kemiskinan sehingga dapat digunakan sebagai pilihan pengambilan kebijakan dalam perencanaan pembangunan.

### 2. Ilmu Pengetahuan

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai kemiskinan dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Kemiskinan

Pengertian kemiskinan bukanlah satu hal yang mudah. Kemiskinan sebagai gejala ekonomi akan berbeda dengan kemiskinan sebagai gejala sosial. Kemiskinan sebagai gejala ekonomi merupakan suatu gejala yang terjadi disekitar lingkungan penduduk miskin dan biasanya dikaitkan dengan masalah kekurangan pendapatan. Sebaliknya kebudayaan kemiskinan lebih banyak terletak dalam diri penduduk miskin itu sendiri seperti cara hidup, tingkah laku dan sebagainya (Hendra Esmara, 1986).

Seseorang dianggap miskin apabila dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kebutuhan hidup minimal itu adalah kebutuhan untuk mengkonsumsi makanan dalam takaran 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan minimal non makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan dan transportasi. Jika ada kebutuhan makanan dalam kalori dan kebutuhan non makanan dalam rupiah, kalau rupiahnya yang terakhir 182.636 perorang perbulan (<http://www.bbc.co.uk/indonesia>).

Selanjutnya menurut Amartya Sen dalam Bloom dan Canning, (2001) bahwa seseorang dikatakan miskin bila mengalami "*capability deprivation*" dimana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Menurut Bloom dan Canning, kebebasan substantif ini memiliki dua sisi: kesempatan dan rasa

Bloom dan Canning, kebebasan substantif ini memiliki dua sisi: kesempatan dan rasa aman. Kesempatan membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan. Menurut *World Bank*, dalam definisi kemiskinan adalah: "the denial of choice and opportunities most basic for human development to lead a long healthy, creative life and enjoy a decent standard of living freedom, self esteem and the respect of other". ([www.worldbank.org](http://www.worldbank.org))

Dari definisi tersebut diperoleh pengertian bahwa kemiskinan itu merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain.

Pengertian kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar (*bargaining*) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Negara-negara maju yang lebih menekankan pada "kualitas hidup" yang dinyatakan dengan perubahan lingkungan hidup melihat bahwa laju pertumbuhan industri tidak mengurangi bahkan justru menambah tingkat polusi udara dan air, mempercepat penyusutan sumber daya alam, dan mengurangi kualitas lingkungan. Sementara untuk negara-negara yang sedang berkembang, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi pada tahun 1960 sedikit sekali pengaruhnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Kemiskinan (*poverty*) merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan itu bersifat multidimensional artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran aspek lainnya. Dan aspek lain dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu manusianya baik secara individual maupun kolektif (Pantjar Simatupang dan Saktyanu K. Dermoredjo, 2003).

Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1995) pola kemiskinan ada empat yaitu, Pertama adalah *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Pola kedua adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan yang mempunyai pengertian tentang sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Secara sosial psikologi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas.

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse, 1953 dalam Mudrajad Kuncoro, (1997) secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

## 2. Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau kemiskinan dapat dilihat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

## 3. Kemiskinan Kultural

Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya. Semua ukuran kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan pada norma pilihan dimana norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran didasarkan konsumsi (*consumption based poverty line*).

Selanjutnya menurut Mudrajad Kuncoro (1997) garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua elemen, yaitu:

1. pengeluaran yang diperlukan untuk memberi standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya.
2. Jumlah kebutuhan yang sangat bervariasi yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Paul Spicker (2002, *Poverty and the Welfare State : Dispelling the Myths*, A Catalyst Working Paper, London: Catalyst.) penyebab kemiskinan dapat dibagi dalam empat mazhab:

1. *Individual explanation*, kemiskinan yang diakibatkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri: malas, pilihan yang salah, gagal dalam bekerja, cacat bawaan, belum siap memiliki anak dan sebagainya.
2. *Familial explanation*, kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor keturunan, dimana antar generasi terjadi ketidakberuntungan yang berulang, terutama akibat pendidikan.
3. *Subcultural explanation*, kemiskinan yang diakibatkan oleh karakteristik perilaku suatu lingkungan yang berakibat pada moral dari masyarakat.
4. *Structural explanations*, menganggap kemiskinan sebagai produk dari masyarakat yang menciptakan ketidakseimbangan dengan perbedaan status atau hak.

Menurut Sharp (dalam Mudrajat Kuncoro, 2006) terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul



karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. Ketiga kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal.

Banyak ukuran yang menentukan angka kemiskinan, salah satunya adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran (dalam rupiah) untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan digunakan untuk mengetahui batas seseorang dikatakan miskin atau tidak, sehingga garis kemiskinan dapat digunakan untuk mengukur dan menentukan jumlah kemiskinan.

Menurut Rencana Kerja Pemerintah Bidang Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, penyebab kemiskinan (dikutip dari Deny Tisna, 2008) adalah pemerataan pembangunan yang belum menyebar secara merata terutama di daerah pedesaan. Penduduk miskin di daerah pedesaan pada tahun 2006 diperkirakan lebih tinggi dari penduduk miskin di daerah perkotaan. Kesempatan berusaha di daerah pedesaan dan perkotaan belum dapat mendorong penciptaan pendapatan bagi

masyarakat terutama bagi rumah tangga miskin. Penyebab yang lain adalah masyarakat miskin belum mampu menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta transportasi. Gizi buruk masih terjadi di lapisan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum memadai. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim-piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih jauh dari memadai.

Pemerintah telah mempersiapkan beberapa program prioritas penanggulangan kemiskinan dalam tahun 2007 didukung oleh beberapa program prioritas lain, antara lain:

1. Memberdayakan kelompok miskin yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia penduduk miskin dengan meningkatkan etos kerja, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, perbaikan konsumsi dan peningkatan gizi, serta perbaikan kemampuan dalam penguasaan IPTEK.
2. Menerapkan kebijakan ekonomi moral yaitu pengembangan sistem ekonomi moral sangat diperlukan sehingga tidak semata-mata mengejar keuntungan tetapi harus adil, sehingga dibutuhkan keadilan ekonomi yang bersumber pada Pancasila bukan pada ekonomi modern yang tidak sesuai dengan budaya bangsa.

3. Melakukan pemetaan kemiskinan yaitu langkah awal dalam upaya penanggulangan kemiskinan yaitu mengenali karakteristik dari penduduk yang miskin sehingga diperlukan pemetaan kemiskinan yang digunakan sebagai alat untuk memecahkan persoalan yang mereka alami.
4. Melakukan program pembangunan wilayah seperti Inpres dan transmigrasi serta memberikan pelayanan perkreditan melalui lembaga perkreditan pedesaan seperti BKD dan KCK – KUD.

### **2.1.2 Pertumbuhan Penduduk**

Menurut Maltus (dikutip dalam Lincolin Arsyad, 1997) kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu dua-kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu pada saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bias mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan perkapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan perkapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil, atau hanya sedikit diatas tingkat subsiten.

Menurut Maier (dikutip dari Mudrajat Kuncoro, 1997) dikalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap suplay bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumberdaya

manusia. Terdapat tiga alasan mengapa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat pembangunan.

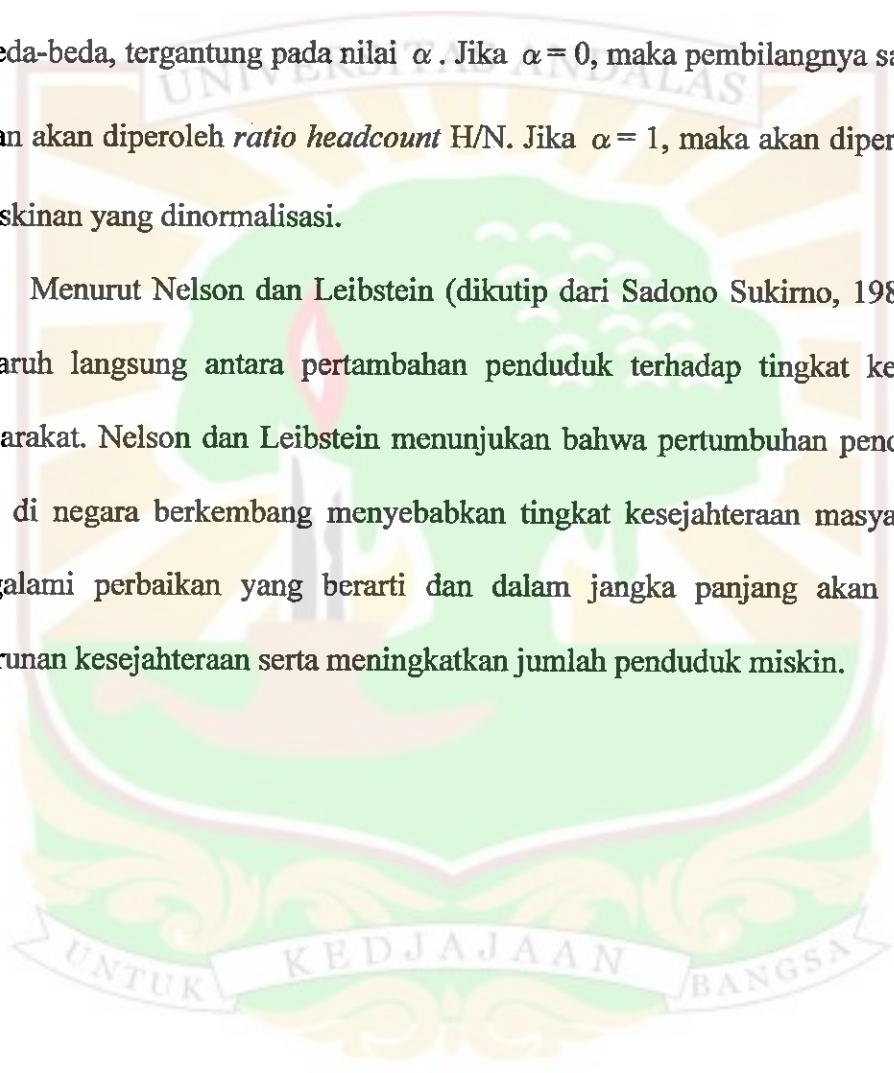
1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dibutuhkan untuk membuat konsumsi dimasa mendatang semakin tinggi. Rendahnya sumberdaya perkapita akan menyebabkan penduduk tumbuh lebih cepat, yang gilirannya membuat investasi dalam “kualitas manusia” semakin sulit.
2. Banyak negara dimana penduduknya masih sangat tergantung dengan sektor pertanian, pertumbuhan penduduk mengancam keseimbangan antara sumberdaya alam yang langka dan penduduk. Sebagian karena pertumbuhan penduduk memperlambat perpindahan penduduk dari sektor pertanian yang rendah produktifitasnya ke sektor pertanian modern dan pekerjaan modern lainnya.
3. Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin sulit melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi dan sosial. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama pertumbuhan kota yang cepat. Bermekarannya kota-kota di NSB membawa masalah-masalah baru dalam menata maupun mempertahankan tingkat kesejahteraan warga kota.

Michael P. Todaro (2000) menyatakan bahwa dalam perhitungan indeks kemiskinan dengan pengukuran indeks Foster Greer Thorbecke yang sering disebut juga sebagai kelas  $P_\alpha$  dari ukuran kemiskinan yaitu dirumuskan sebagai berikut:

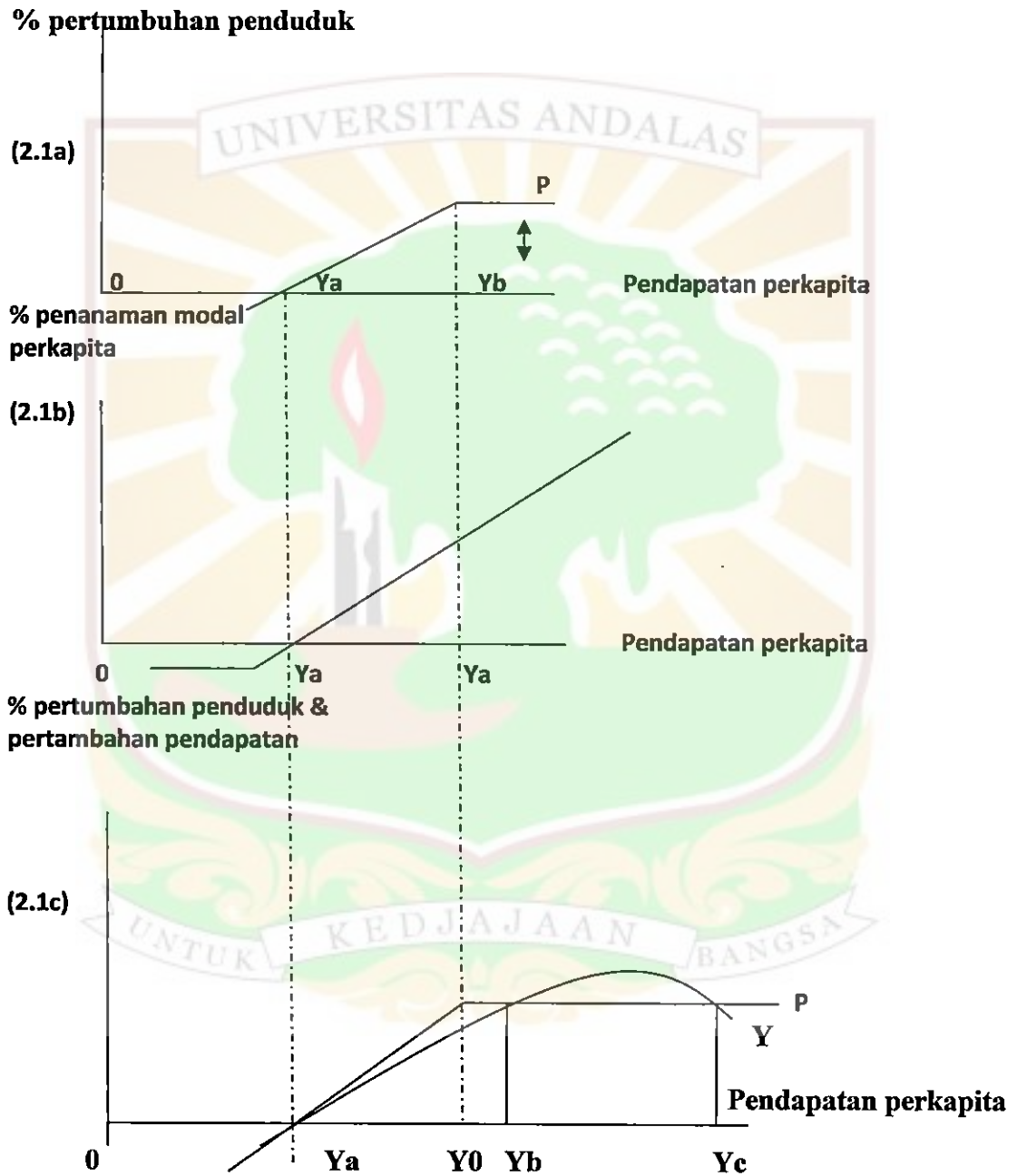
$$P_{\alpha} = \frac{1}{N} \frac{\sum_{i=1}^H (Y_p - Y_i)}{Y_p} \dots\dots\dots (2.1)$$

Dimana  $Y_i$  adalah pendapatan dari orang miskin yang ke- $i$ ,  $Y_p$  adalah garis kemiskinan dan  $N$  adalah jumlah penduduk. Indeks  $P_{\alpha}$  mempunyai bentuk yang berbeda-beda, tergantung pada nilai  $\alpha$ . Jika  $\alpha = 0$ , maka pembilangnya sama dengan  $H$ , dan akan diperoleh *ratio headcount*  $H/N$ . Jika  $\alpha = 1$ , maka akan diperoleh jurang kemiskinan yang dinormalisasi.

Menurut Nelson dan Leibstein (dikutip dari Sadono Sukirno, 1983) terdapat pengaruh langsung antara penambahan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Nelson dan Leibstein menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat di negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin.



**Gambar 2.1**  
**Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kesejahteraan**  
**Menurut Nelson Dan Leibstein**



(sumber : Sadono Sukirno, 1983)

Berdasarkan gambar (2.1) di atas bahwa sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang pesat dalam jangka panjang tingkat pendapatan perkapita akan kembali mencapai nilai yang sama dengan tingkat pendapatan cukup hidup. Gambar (2.1a) menunjukkan hubungan diantara pendapatan perkapita dan tingkat pertumbuhan penduduk, dan gambar (2.1b) menunjukkan hubungan antara pendapatan perkapita dan tingkat penanaman modal perkapita. Sedangkan gambar (2.1c) menunjukkan hubungan antara pendapatan perkapita dan tingkat pertumbuhan penduduk, selain itu juga menunjukkan hubungan pertumbuhan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita.

### **2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Michael P. Todaro (2000), mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi semua negara di dunia sekarang ini. Pemerintah di negara manapun dapat segera jatuh atau bangun berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapainya dalam catatan statistik nasional. Berhasil tidaknya program-program di negara-negara dunia ketiga sering dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat output dan pendapatan nasional.

Pada awal tahun 1970, para ahli ekonomi mulai meragukan manfaat pertumbuhan pendapatan nasional dalam pembangunan ekonomi sebab di banyak negara yang sedang berkembang terdapat gejala adanya kemiskinan, ketidakmerataan distribusi pendapatan, dan pengangguran yang cenderung meningkat walaupun pendapatan nasional mengalami peningkatan secara stabil. Oleh sebab itu, mulai awal

tahun 1970 muncul pendapat bahwa apabila pembangunan tidak disertai pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada penduduk miskin, maka mustahil akan memberikan hasil yang optimal. Dalam periode tersebut munculah teori-teori baru seperti Teori Pertumbuhan dan Distribusi New-Keynesian oleh Kaldor (1955) dan Passinetti (1962). Secara umum, teori-teori ini menyatakan bahwa pembangunan ekonomi akan mencapai hasil yang optimal jika peningkatan pendapatan nasional disertai dengan pemerataan pendapatan bagi seluruh kelompok masyarakat (Tambunan dalam Dian Octaviani, 2001).

Menurut Prof. Simon Kuznets (dikutip dari Budiono, 1999) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologi terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Hal tersebut menjadikan pertumbuhan ekonomi dicirikan dengan 3 hal pokok, antara lain:

1. Laju pertumbuhan perkapita dalam arti nyata (riil).
2. Persebaran atau distribusi angkatan kerja menurut sektor kegiatan produksi yang menjadi sumber nafkahnya.
3. Pola persebaran penduduk.

Selanjutnya Boediono (1999) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah salah satu proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dimana penekanannya pada 3 aspek, antara lain:



1. Proses, yaitu pertumbuhan ekonomi bukan merupakan suatu gambaran dari suatu perekonomian yang melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.
2. Output per kapita, yaitu pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan adanya kenaikan output per kapita dalam hal ini ada dua unsur yang penting seperti output total dan jumlah penduduk.
3. Jangka waktu, yaitu kenaikan output per kapita selama 1 – 2 tahun lalu diikuti penurunan output per kapita bukan merupakan pertumbuhan ekonomi. Di katakan tumbuh bila dalam jangka waktu yang lama (5 tahun atau lebih) mengalami kenaikan output per kapita.

Sementara menurut Michael P. Todaro (dikutip dari Tambunan, 2001) sampai akhir tahun 1960, para ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut, angka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Akibatnya, sasaran utama dalam pembangunan ekonomi lebih ditekankan pada usaha-usaha pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi, pembangunan yang dilakukan pada negara yang sedang berkembang sering mengalami dilema antara pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus

diambil. Namun yang menjadi permasalahan bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya.

Robert Solow (dikutip dari Dornbush, et al, 2004) mengemukakan model pertumbuhan ekonomi yang disebut model pertumbuhan Solow. Model tersebut berangkat dari fungsi produksi agregat sebagai berikut:

$$Y = A \cdot F(K,L) \dots\dots\dots(2.2)$$

Dimana Y adalah output nasional (kawasan), K adalah modal (kapital) fisik, L adalah tenaga kerja dan A merupakan teknologi. Faktor yang mempengaruhi pengadaan modal fisik adalah investasi. Y juga akan meningkat jika terjadi perkembangan dalam kemajuan teknologi yang terindikasi dari kenaikan A. Oleh karena itu pertumbuhan perekonomian nasional dapat berasal dari pertumbuhan input dan perkembangan kemajuan teknologi yang disebut juga pertumbuhan total faktor produktivitas.

Model Solow dapat diperluas sehingga mencakup sumberdaya alam sebagai salah satu input. Dasar pemikirannya yaitu output nasional tidak hanya dipengaruhi K dan L tapi juga dipengaruhi oleh lahan pertanian atau sumberdaya alam lainnya seperti cadangan minyak. Perluasan model Solow lainnya adalah dengan memasukkan sumberdaya manusia sebagai modal (Human Capital). Dalam literatur, teori pertumbuhan seperti ini terkategori sebagai *pertumbuhan endogen* dengan pionirnya Lucas dan Romer. Lucas menyatakan bahwa akumulasi modal manusia, sebagaimana akumulasi modal fisik menentukan pertumbuhan ekonomi, sedangkan

Romer berpandangan bahwa pertumbuhan dipengaruhi oleh tingkat modal manusia melalui pertumbuhan teknologi. Secara sederhana dengan demikian fungsi produksi agregat dapat dimodifikasi menjadi sebagai berikut:

$$Y = A \cdot F(K, H, L) \dots\dots\dots (2.3)$$

Pada persamaan diatas, H adalah sumberdaya manusia yang merupakan akumulasi dari pendidikan dan pelatihan. Menurut Mankiw et. al. (1992) kontribusi dari setiap input pada persamaan tersebut terhadap output nasional bersifat proporsional. Suatu negara yang memberikan perhatian lebih kepada pendidikan terhadap masyarakatnya *ceteris paribus* lebih baik daripada yang tidak melakukannya. Dengan kata lain, investasi terhadap sumberdaya manusia melalui kemajuan pendidikan akan menghasilkan pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Apabila investasi tersebut dilaksanakan secara relatif merata, termasuk terhadap golongan berpendapatan rendah, maka kemiskinan akan berkurang. Sehingga dapat di simpulkan bahwa apabila pertumbuhan output meningkat yang dipengaruhi investasi terhadap sumberdaya manusia maka dapat menurunkan kemiskinan.

Menurut Mudrajad Kuncoro (2004), menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Saat ini umumnya PDRB baru dihitung berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari sisi sektoral / lapangan usaha dan dari sisi

penggunaan. Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar dimana dalam perhitungan ini digunakan tahun 1993. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 2005), sedangkan menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi.

Untuk lebih jelas dalam menghitung angka-angka Produk Domestik Regional Bruto ada tiga pendekatan yang cukup kerap digunakan dalam melakukan suatu penelitian :

1. Menurut pendekatan Produksi

Dalam pendekatan produksi, Produk Domestik Regional Bruto adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh

suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara bahan baku/penolong dari luar yang dipakai dalam proses produksi (Robinson Tarigan, 2005).

## 2. Menurut pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi, yaitu upah dan gaji dan surplus usaha, penyusutan, pajak tidak langsung dan neto. Pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha meliputi bunga yang dibayarkan neto, sewa tanah, dan keuntungan. Metode pendekatan pendapatan banyak dipakai pada sektor jasa, tetapi tidak dibayar setara harga pasar, misalnya sektor pemerintahan. Hal ini disebabkan kurang lengkapnya data dan tidak adanya metode yang akurat yang dapat dipakai dalam mengukur nilai produksi dan biaya antara dari berbagai kegiatan jasa, terutama kegiatan yang tidak mengutip biaya (Robinson Tarigan, 2005).

## 3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan dari segi pengeluaran adalah menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jika dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan/produksi barang dan jasa itu

digunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok dan ekspor neto.

Cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto disusun dalam dua bentuk, yaitu:

1. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan Menurut BPS pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik Regional Bruto riilnya.
2. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut BPS adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input langsung. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

#### **2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Berdasarkan teori keyness, APBD merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Peranan APBD sebagai pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Kebijakan pengelolaan APBD difokuskan pada optimalisasi fungsi dan manfaat pendapatan, belanja dan pembiayaan bagi tercapainya sasaran atas agenda-agenda pembangunan tahunan. (<http://www.bimakab.go.id/index.php>).

Menurut Ismawanto (2009), APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh penerimaan dan belanja (pengeluaran) pemerintah daerah, baik provinsi ataupun kabupaten dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD.

Menurut Salmon A. Situmeang (2010), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di bahas dan di setujui bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, dan di tetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah, semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus di masukkan

dalam APBD. Penyusunan APBD di sesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) 105/2000 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersangkut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sedangkan menurut Daeng Sudirwo (1980), menyatakan bahwa Keuangan Daerah merupakan suatu bidang dalam pemerintahan daerah yang menentukan besarnya pengeluaran maupun penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan, pelayanan kepada masyarakat dan keperluan daerah lainnya.

Menurut UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara di atur sebagai pembahasan APBD, dengan penyampaian kebijakan umum APBD kepada DPRD selambat lambatnya pertengahan bulan Juni, selanjutnya DPRD membahas kebijakan umum APBD yang di ajukan oleh pemerintah daerah tersebut dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas:

- a) Anggaran Pendapatan
- b) Anggaran Belanja
- c) Anggaran Pembiayaan



Anggaran Pendapatan berasal dari :

- a) Pendapatan Asli Daerah
- b) Dana Perimbangan
- c) Lain lain Pendapatan

Anggaran Belanja di klasifikasikan menurut :

- a) Organisasi
- b) Fungsi
- c) Program
- d) Kegiatan
- e) Jenis Belanja

Anggaran Pembiayaan terdiri atas :

- a) Penerimaan Pembiayaan
- b) Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai fungsi:

- a) Fungsi Otorisasi
- b) Fungsi Perencanaan
- c) Fungsi Pengawasan
- d) Fungsi Alokasi
- e) Fungsi Distribusi.

Selanjutnya untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, daerah membutuhkan dana yang besar dan berkesinambungan, oleh karena itu pemerintah daerah harus bekerja keras menggali sumber pendapatan yang ada di daerah dan

menjadi kewenangannya, dengan jalan meningkatkan sumber pendapatan yang sudah ada dan mencari sumber baru penerimaan terutama dari pajak daerah, retribusi daerah dan juga sumber-sumber penerimaan daerah lainnya.

UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah secara kenyataannya memberikan keleluasaan yang besar kepada daerah untuk mengembangkan dan mengelola sumber daya yang ada di daerahnya tanpa harus lagi menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah yang semula hanya menunggu jenis atau kegiatan apa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan bagaimana pekerjaan itu dilakukan di daerah, namun kini pemerintah daerah dapat berfikir sendiri mengenai persoalan yang dihadapi daerahnya hingga solusi penyelesaian yang dilakukannya dapat dilaksanakan secara terprogram, sistematis, strategis dan spesifik sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.

Sedangkan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang menyatakan bahwa UU No. 25 tahun 1999 tentang hal yang sama yaitu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu disempurnakan dan digantikan dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembuatan dan pelaksanaan dari undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut, sebenarnya adalah amanat dari pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengata

agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di atur dan di laksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Sumber sumber yang menjadi penerimaan daerah juga di atur pada pasal 5 UU No. 33 tahun 2004 ini dengan ayat sebagai berikut :

1. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.
2. Pendapatan daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - b. Dana Perimbangan yang terdiri dari :
    - a) Dana Bagi Hasil (DBH)
    - b) Dana Alokasi Umum (DAU)
    - c) Alokasi Khusus (DAK)
  - c. Lain lain pendapatan
3. Pembiayaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) bersumber dari :
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
  - b. Penerimaan pinjaman daerah
  - c. Dana cadangan daerah
  - d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang di pisahkan.

### **2.1.5 Angkatan Kerja**

Menurut Michael P. Todaro (1994), pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja secara tradisional di anggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan

ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar akan meningkatkan pasar domestik.

Menurut Dumairy (1996), tenaga kerja (*manpower*) dibedakan menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja (*Labor force*) dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang bukan termasuk angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan, yakni bukan orang-orang yang kegiatannya bersekolah (pelajar, mahasiswa), mengurus rumah tangga, serta menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya (pensiun, penderita cacat dependen).

Selanjutnya, angkatan kerja dibedakan pula menjadi dua subkelompok yaitu pekerja dan pengangguran. Yang dimaksud dengan pekerja ialah orang-orang yang mempunyai pekerjaan, mencakup orang yang mempunyai pekerjaan dan memang sedang bekerja, serta orang yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara waktu kebetulan sedang tidak bekerja. Dalam Biro Pusat Statistik (BPS) pengertian bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh upah atau memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara kontinyu dalam seminggu yang lalu. Termasuk dalam batasan pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam usaha atau kegiatan ekonomi. Yang dimaksud

dengan pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Pengangguran semacam ini oleh BPS dinyatakan sebagai pengangguran terbuka.

Tenaga kerja yang bukan angkatan kerja dibedakan menjadi tiga subkelompok yaitu penduduk dalam usia kerja yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga, serta menerima pendapatan lain. Batasan BPS mengenai bersekolah adalah bersekolah formal dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, termasuk pelajar dan mahasiswa yang sedang berlibur. Dengan demikian konsep pemilahan penduduk menurut pendekatan angkatan kerja (*labor force approach*) adalah sebagai berikut:



Sumber : Dumairy (1996)

Selanjutnya menurut Tulus Tambuhan (1996), tenaga kerja adalah bagian dari penduduk (usia kerja), baik yang bekerja maupun mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Besarnya pertumbuhan angkatan kerja setiap tahun sangat tergantung pada besarnya pertumbuhan penduduk secara kumulatif setiap tahun. Pertumbuhan atau ekstra penambahan angkatan kerja pada periode  $t = 0$  sebagian berasal dari penduduk yang lahir waktu  $t - 10$ , sedangkan sebagian lainnya berasal dari penduduk yang lahir pada periode-periode sebelumnya. Jumlah angkatan kerja pada tahun  $t + 1$  berasal dari penduduk yang masuk angkatan kerja pada periode  $t - 9, t - 10, t - 11$ , hingga  $t - 64$ .

Bila laju pertumbuhan angkatan kerja tetap, misalnya rata-rata 2% pertahun, proyeksi angkatan kerja untuk waktu yang akan datang bisa diperhitungkan melalui pendekatan *pure forecasts* seperti berikut. Misalkan, jumlah angkatan kerja pada periode  $t = 0 = L_0$ . Jumlah angkatan kerja pada waktu  $t = 1$  adalah sebagai berikut:

$$L_t = L_0(1 + b)^t$$

Dimana :

$b$  = angka konstanta yang merupakan koefisiensi arah dari data

$t$  = waktu

Apabila laju pertumbuhan angkatan kerja pada waktu  $t = 1$  adalah sebagai berikut:

$$\frac{\Delta L_t}{L_0} = \frac{L_t - L_0}{L_0} \times 100\%$$

Jumlah angkatan kerja di masa depan tidak hanya tergantung pada jumlah penduduk, tetapi juga dari proporsi penduduk yang sudah masuk usia kerja (angkatan kerja) dan tingkat partisipasi angkatan kerja di dalam pasar tenaga kerja itu sendiri tergantung pada sejumlah faktor dan karakteristik penduduk, seperti struktur umur dan jenis kelamin, lokasi tempat tinggal dan tempat kerja yang masih terbuka, status pendapatan, tingkat pendidikan atau keterampilan, serta kesempatan kerja dan mendapatkan pendapatan yang ada. Selain faktor tersebut, selera dan pilihan (*preference*) individu untuk bekerja atau tidak bekerja (*leisure*) serta faktor sosial dan kultur juga sangat mempengaruhi tingkat partisipasi tenaga kerja dari angkatan kerja yang ada.

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di negara yang sedang berkembang menjadi semakin serius. Tingkat pengangguran terbuka sekarang ini yang ada di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia rata-rata sekitar 10 persen dari seluruh angkatan kerja di perkotaan. Masalah ini dipandang lebih serius lagi bagi mereka yang berusia antara 15 - 24 tahun yang kebanyakan mempunyai pendidikan yang lumayan. Namun demikian, tingkat pengangguran terbuka di perkotaan hanya menunjukkan aspek-aspek yang tampak saja dari masalah kesempatan kerja di negara yang sedang berkembang yang bagaikan ujung sebuah gunung es. Apabila mereka tidak bekerja konsekuensinya adalah mereka tidak dapat

memenuhi kebutuhan dengan baik, kondisi seperti ini membawa dampak bagi terciptanya dan membengkaknya jumlah kemiskinan yang ada.

Oleh sebab itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah telah merumuskan berbagai rencana untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak guna mengurangi tingkat pengangguran. Rencana tersebut antara lain:

1. Meningkatkan efektifitas dan kemampuan kelembagaan pemerintah dalam menegakkan hubungan industrial yang manusiawi.
2. Meningkatkan kemitraan global dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja.
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin dalam rangka mengembangkan kemampuan kerja dan berusaha.
4. Meningkatkan perlindungan terhadap buruh migran di dalam dan luar negeri.

## **2.2 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen**

### **2.2.1 Pengaruh PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan**

Menurut Michael P. Todaro (dikutip dari Tambunan, 2001) pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi permasalahan bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya.



Menurut Mudrajad Kuncoro (2001) pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Sedangkan menurut Sadono Sukirno (2000), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar ke lapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas dan pada konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.

Selanjutnya menurut Kuznet (dikutip dari Tulus Tambunan, 2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Selanjutnya menurut penelitian Deni Tisna (2008) menyatakan bahwa PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

### **2.2.2 Pengaruh APBD terhadap Kemiskinan**

Menurut Abena D. Oduro (2001), menyatakan pengeluaran pemerintah memiliki dampak penurunan kemiskinan melalui: penyediaan infrastruktur dan pelayanan untuk orang miskin, menciptakan kondisi yang akan meningkatkan kemampuan masyarakat miskin untuk mengakumulasi asset. Di negara-negara Ghana belanja sektor publik merupakan komponen penting dari strategi pengurangan kemiskinan. Dalam merancang program-program pengeluaran pemerintah dapat mengurangi kemiskinan, langkah pertama, harus memastikan bahwa pengeluaran pemerintah dapat mengurangi kemiskinan. Langkah kedua adalah mengidentifikasi sumber-sumber dana yang dikeluarkan untuk mengurangi kemiskinan. Langkah ketiga adalah untuk mengalokasikan sumber dana publik sehingga memiliki dampak maksimum pada pengeluaran kemiskinaan.

Selanjutnya alasan klasik yang muncul dalam konteks minimnya penanganan masalah-masalah kemiskinan adalah keterbatasan anggaran dalam APBD. Ketersediaan anggaran yang terbatas ini seolah-olah menjadi alasan pembenar bagi pemerintah daerah untuk tidak mengkover persoalan-persoalan masyarakat yang terkait dengan kondisi kemiskinan yang dihadapi secara proporsional. Di saat yang sama, alokasi-alokasi anggaran yang sesungguhnya tidak terkait langsung dengan penanganan kemiskinan justru memperoleh “jatah” yang lebih dari cukup. Hal ini menunjukkan minimnya porsi anggaran-anggaran dalam rangka pengentasan kemiskinan karena alasan keterbatasan anggaran sudah tidak relevan.

Sementara menurut Gazi Mainul Hassan (2005), menyatakan ada hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pengurangan kemiskinan. Di mana pengeluaran pemerintah mengurangi kemiskinan melalui pembinaan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan upah nasional. Pengeluaran pemerintah seperti sektor pertanian dan pembangunan pedesaan, pendidikan dan kesehatan secara langsung pro-miskin, sektor tersebut membantu untuk mengurangi kemiskinan nasional dan menghasilkan pertumbuhan jangka panjang untuk sumber daya di masa depan.

Dalam <http://aqen.multiply.com>, menyatakan mainstream pembangunan dibentuk dari proyeksi dan orientasi yang dipolakan untuk mengatasi persoalan-persoalan sosial. Pendasaran proyeksi dan orientasi ini diawali dari identifikasi persoalan yang mendesak untuk segera ditangani yang secara konsisten adalah kemiskinan. APBD merupakan salah satu instrumen pemerintah daerah yang bisa digunakan untuk mengurai persoalan kemiskinan. Beberapa hal penting untuk mengarus utamakan penanganan kemiskinan dalam APBD adalah:

**Pertama**, menetapkan anggaran dan kerangka program pengentasan kemiskinan pada masing-masing sektor. Anggaran dan kerangka program ini dimaksudkan untuk menuntun program-program lain mensinergikan dirinya dengan mainstream pengentasan kemiskinan. Tanpa ada anggaran dan kerangka program ini, alokasi-alokasi yang dimiliki oleh masing-masing sektor berpotensi besar, kurang memberikan efek bagi masyarakat.

**Kedua**, mekanisme reward dan punishment yang diterapkan pada sektor-sektor pengguna anggaran. Model ini penting untuk menciptakan area baru bagi kompetisi masing-masing sektor melaksanakan program pengentasan kemiskinan.

**Ketiga**, merancang alat ukur untuk mengetahui dampak pengelolaan anggaran bagi pengurangan kemiskinan. Hal ini untuk mengevaluasi efektifitas program pengentasan kemiskinan. Anggaran sesungguhnya hanyalah alat bantu untuk menstimulasi pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya alat ukur ini, hasil yang diperoleh dapat digunakan sebagai referensi bagi pelaksanaan evaluasi dan perencanaan program lanjutan.

### **2.2.3 Pengaruh Angkatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan**

Menurut Lincoln Arsyad (1997), salah satu tujuan yang penting dalam pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja, lebih-lebih bagi negara berkembang, terutama Indonesia, dimana pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Ada beberapa faktor mengapa hal tersebut lebih menonjol atau penting bagi negara berkembang. Pertama, pertumbuhan penduduk di negara berkembang cenderung tinggi, sehingga cenderung melebihi pertumbuhan kapital. Kedua, demografi profil lebih muda, sehingga lebih banyak penduduk yang masuk ke lapangan kerja. Ketiga, struktur industri di negara berkembang, yang cenderung mempunyai tingkat diversifikasi kegiatan ekonomi rendah, serta tingkat keterampilan penduduk yang belum memadai, membuat usaha penciptaan lapangan kerja menjadi semakin kompleks.

Selanjutnya Shinichi Ichimura (1989), masalah kemiskinan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari masalah tingginya beban tanggungan. Orang miskin di Indonesia memiliki anggota keluarga yang lebih banyak dan jumlahnya besar dalam angkatan kerja. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga miskin sangat rendah, demikian juga halnya dengan anggota keluarganya. Anggota keluarga miskin sering berganti-ganti pekerjaan dan mereka yang telah bekerja sering memiliki pekerjaan-pekerjaan tambahan.

Pertumbuhan penduduk yang terjadi di daerah pedesaan biasanya tergolong tinggi. Keadaan ini mengakibatkan sebagian besar jumlah penduduk terdiri dari anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun dan belum bisa bekerja, sehingga angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan yang tetap, maka sudah dapat dipastikan keluarga tersebut semakin terbelenggu oleh kemiskinaaan.

Sedangkan menurut Michael P. Todaro (2000), salah satu implikasi yang menonjol atas tingginya angka kelahiran di negara sedang berkembang adalah lebih besar dari 40% penduduknya terdiri dari anak-anak yang berumur di bawah 15 tahun. Jadi angkatan kerja produktif di negara berkembang harus memelihara lebih banyak beban atau tanggungan yang secara proporsional jumlahnya hampir dua kali lipat dibandingkan dengan negara-negara kaya. Di pihak lain, proporsi penduduk yang berumur di atas 65 tahun jauh lebih besar di negara maju. Penduduk yang berusia lanjut maupun anak-anak secara ekonomis di sebut beban ketergantungan.

Dari pengertian di atas simpulkan bahwa tingginya angka kelahiran dapat menjadikan beban tanggungan bagi angkatan kerja produktif. Hal ini dianggap

sebagai penyebab pokok terjadinya kemiskinan, standar hidup yang rendah (pendapatan rendah, fasilitas perumahan tidak memadai, pendidikan terbatas, kematian tinggi, umur pendek, harapan kosong, perasaan kacau dan putus asa), kekurangan gizi, kesehatan yang buruk, degradasi lingkungan dan masalah sosialnya.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian tentang kemiskinan di berbagai negara telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, antara lain:

- a). Penelitian yang dilakukan oleh Dian Octaviani (2001), hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kenaikan angka pengangguran mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan, sebaliknya semakin kecil angka pengangguran akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat kemiskinan di Indonesia.
- b). Penelitian yang dilakukan oleh Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2006), menyimpulkan bahwa kenaikan PDRB mengakibatkan penurunan atas angka kemiskinan, kenaikan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan, kenaikan inflasi mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan, kenaikan Share pertanian dan industri mengakibatkan penurunan atas angka kemiskinan, kenaikan tingkat pendidikan mengakibatkan penurunan atas angka kemiskinan. Dimana pengaruh tingkat pendidik SMP lebih besar daripada pengaruh share pertanian. Sedangkan kenaikan Dummy krisis mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan.

- c). Penelitian yang dilakukan oleh Ravi Dwi Wijayanto (2010), yang menganalisis tentang PDRB, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap kemiskinan, pendidikan yang tercermin dari besarnya tingkat melek huruf memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
- d). Penelitian yang dilakukan oleh Deny Tisna Amijaya (2008), hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ketidakmerataan distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.
- e). Penelitian yang dilakukan oleh Rasidin K. Sitepul dan Bonar M. Sinaga (2009), hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa peningkatan investasi sumberdaya manusia secara langsung berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja yang mendorong pada peningkatan Produk Domestik Bruto Riil, yang ditunjukkan oleh peningkatan stok kapital, neraca perdagangan dan konsumsi rumah tangga. Investasi sumberdaya manusia untuk pendidikan dapat menurunkan *poverty incidence*, *poverty depth* dan *poverty severity* kecuali untuk rumah tangga bukan pertanian golongan atas di desa, bukan angkatan kerja di kota dan bukan pertanian golongan atas di kota.

- f). Penelitian yang dilakukan oleh Abena D. Oduro (2001), yang menganalisis tentang pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

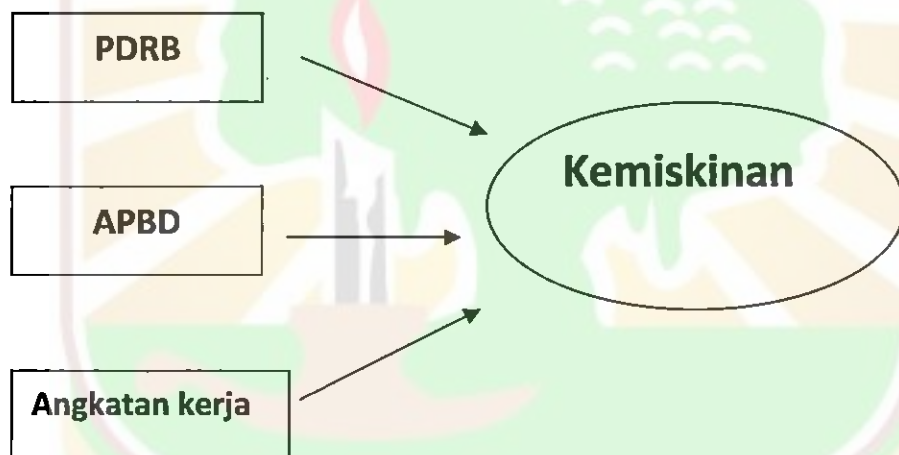
## **2.4 Kerangka Pemikiran**

Padahal tujuan perencanaan pembangunan yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang nantinya penting dalam mengurangi kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Hal ini merupakan permasalahan mendasar dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Hermanto dan Dwi (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang lazim dipergunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan. Dimana pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB, pertumbuhan jumlah penduduk, tingkat share pertanian dan industri tingkat inflasi. Selanjutnya Deni Tisna (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara ketidakmerataan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan. Sehingga penelitian ini difokuskan pada bagaimana pengaruh PDRB, APBD dan angkatan kerja terhadap kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh tiga variabel pembangunan ekonomi, antara lain PDRB, APBD dan angkatan kerja. Kemudian variabel-variabel tersebut sebagai variabel independen (bebas) dan bersama-sama, dengan variabel dependen (terikat) yaitu kemiskinan yang



diukur dengan alat analisis regresi untuk mendapatkan tingkat signifikansinya. Dengan hasil regresi tersebut diharapkan mendapatkan tingkat signifikansi setiap variabel independen dalam mempengaruhi kemiskinan. Selanjutnya tingkat signifikansi setiap variable independen tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran kepada pemerintah dan pihak yang terkait mengenai penyebab kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat untuk dapat merumuskan suatu kebijakan yang relevan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Secara skema kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

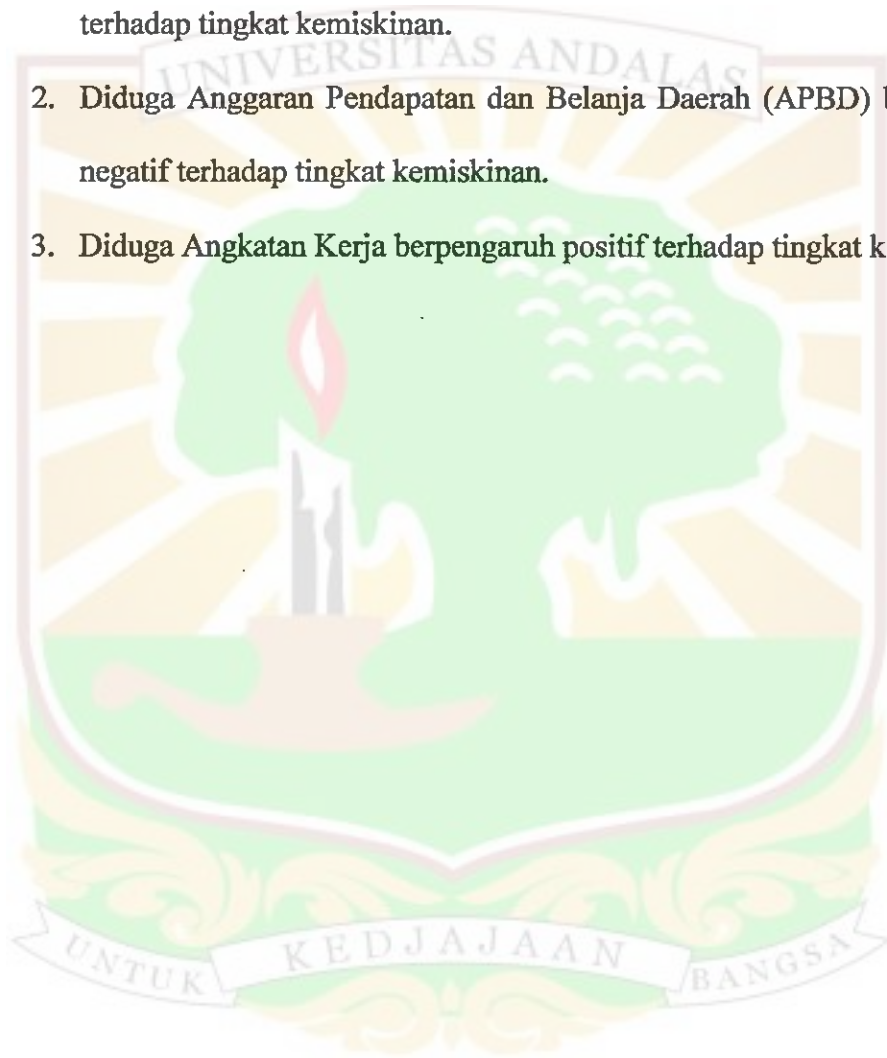


## 2.5 Hipotesis

Hipotesis adalah pendapat sementara dan pedoman serta arah dalam penelitian yang disusun berdasarkan pada teori yang terkait, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih (J. Supranto, 1997)

Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.
2. Diduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.
3. Diduga Angkatan Kerja berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah penggabungan dari deret berkala (*time series*) dari tahun 2000 – 2009.

Data sekunder yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya diambil dari Badan Pusat Statistik, dokumen-dokumen perusahaan atau organisasi, surat kabar dan majalah, ataupun publikasi lainnya (Marzuki, 2005). Periode data yang digunakan adalah data tahun 2000 – 2009 di Kabupaten Pasaman Barat data yang diperlukan adalah:

1. Data persentase penduduk miskin di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2000-2009.
2. Data Laju Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2000-2009.
3. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terealisasi di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2000-2009.
4. Data angkatan kerja di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2000-2009.

Adapun sumber data tersebut diatas diperoleh dari:

1. Data persentase penduduk miskin, yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam terbitan “Data dan Informasi Kemiskinan”.

2. Data laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2000-2009, yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam terbitan “PDRB Pasaman Barat”.
3. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu dari Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2000-2009.
4. Data Angkatan Kerja di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2000-2009, yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam terbitan “Keadaan Angkatan Kerja di Kabupaten Pasaman Barat”.

### 3.2 Pembentukan Model

Model ini di turunkan dari model yang sudah di kembangkan oleh Gazi Mainul Hassan (2005) dan Abena D. Oduro (2001). Mereka menyatakan ada hubungan negatif antara pengeluaran pemerintah dengan kemiskinan, dimana penelitiannya menggambarkan model sebagai berikut:

$$P = f(ZGDP, EMP, WAGES) \dots\dots\dots(3.1)$$

Di mana:

P = Poverty

ZGDP = GDP growth

EMP = employment

Wages = wages

Sedangkan angkatan kerja didasarkan pada model yang dikemukakan oleh Elfindri dan Nasri Bachtiar adalah:

$$AK = K + MP \dots\dots\dots(3.2)$$

Di mana:

AK = angkatan kerja

K = bekerja

MP = mencari pekerjaan

Dalam studi ini menggunakan analisis deret waktu (*time-series data*) sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 15 for windows. Menurut Gujarati (2003) persamaan model dengan *time-series* adalah :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \varepsilon_t; t = 1, 2, \dots, T \dots\dots\dots(3.3)$$

dimana T adalah banyaknya *data time-series*.

Berdasarkan model di atas mencoba mengaplikasikannya terhadap penelitian di Kabupaten Pasaman Barat. Di bentuk fungsi antara pengaruh PDRB, APBD dan angkatan kerja, yang akan digunakan untuk mengetahui kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat yaitu:

$$KM = f(PDRB, APBD, AK) \dots\dots\dots(3.4)$$

$$KM = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + U \dots\dots\dots(3.5)$$

dimana:

KM = Persentase kemiskinan dalam persen.

X1 = Laju PDRB harga konstan 2000 dalam rupiah

X2 = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rupiah

X3 = Angkatan kerja dalam jumlah orang

B0 = konstanta.

B1, B2, B3 = koefisien.

U = error

Adanya perbedaan dalam satuan dan besaran variabel bebas dalam persamaan menyebabkan persamaan regresi harus dibuat dengan model logaritma natural. Alasan pemilihan model logaritma natural (Imam Ghazali, 2005) adalah sebagai berikut :

- a) Menghindari adanya heteroskedastisitas.
- b) Mengetahui koefisien yang menunjukkan elastisitas.
- c) Mendekatkan skala data

Dalam model penelitian ini logaritma yang digunakan adalah dalam bentuk log - linear (*log*). Sehingga persamaan menjadi sebagai berikut:

$$\text{Log KM} = \beta_0 + \beta_1 \text{Log PDRB} + \beta_2 \text{Log APBD} + \beta_3 \text{Log AK} + U$$

..... (3.6)

Di mana:

$\log = \text{log-linear.}$

$\beta_1 - \beta_3 = \text{koefisien.}$

$U = \text{error.}$

### 3.3 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional

Variabel penelitian merupakan *construct* atau konsep yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran yang nyata mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen.

#### 1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian adalah kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2000-2009.

#### 2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan angkatan kerja (AK).

Langkah berikutnya setelah menspesifikasi variabel-variabel penelitian adalah melakukan pendefinisian secara operasional. Hal ini bertujuan agar variabel penelitian yang telah ditetapkan dapat dioperasionalkan, sehingga memberikan petunjuk tentang bagian suatu variabel dapat diukur.

Dalam penelitian ini definisi operasional yang digunakan adalah sebagai berikut:

## **1. Kemiskinan (KM) (Y)**

Kemiskinan berarti sejumlah penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang telah ditetapkan oleh suatu badan atau orang tertentu dan perhitungan yang dilakukan oleh badan atau organisasi tersebut digunakan sebagai standar perhitungan untuk menentukan jumlah kemiskinan yang ada di suatu daerah. Atau singkatnya, penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, garis kemiskinan yang digunakan adalah garis kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah persentase penduduk miskin tahun 2000 – 2009 (dalam satuan persen).

## **2. PDRB (PDRB) (X1)**

PDRB adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang diproduksi didalam suatu daerah tertentu dalam satu tahun tertentu. Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Sadono Sukirno (2000). Laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi berlaku atau tidak, perhitungan PDRB akan ditimbulkan dari suatu daerah ada tiga pendekatan. PDRB yang dimaksud adalah laju PDRB atas dasar harga konstan (2000) tahun 2000 – 2009 (dalam rupiah).



### **3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (X2)**

Menurut Ismawanto (2009), APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh penerimaan dan belanja (pengeluaran) pemerintah daerah, baik provinsi ataupun kabupaten dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD. Selanjutnya menurut Abena D. Oduro (2001) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat mengurangi kemiskinan melalui: penyediaan infrastruktur dan pelayanan untuk orang miskin, menciptakan kondisi yang akan meningkatkan kemampuan masyarakat miskin untuk mengakumulasi asset. Penanganan masalah-masalah kemiskinan adalah keterbatasan anggaran dalam APBD. Ketersediaan anggaran yang terbatas ini seolah-olah menjadi alasan pembenar bagi pemerintah daerah untuk tidak mengcover persoalan-persoalan masyarakat yang terkait dengan kondisi kemiskinan yang dihadapi secara proporsional. Data yang digunakan untuk melihat Anggaran Pendapatan Belanja dan daerah adalah data orang yang di ambil dari DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan Asset Daerah) di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2000 – 2009 (dalam rupiah).

### **4. Angkatan kerja (AK) (X3)**

Angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi disampaikan oleh Wahyu Adji, Suwerli, Suratno (2005). Aktif ini tidak selalu berarti sudah bekerja yang digolongkan sebagian

angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15 tahun ke atas) baik yang bekerja maupun yang mencari pekerjaan (pengangguran). Batas usia ini diatur dalam UU No 20 tahun 1999 pasal 2 ayat 2. Sedangkan menurut versi Bank dunia adalah antara 15-64 tahun. Pengangguran berarti seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Data yang digunakan untuk melihat angkatan kerja adalah data orang yang bekerja di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2000 – 2009 (dalam satuan jiwa).

### **3.4 Metode Analisis**

#### **3.4.1 Analisa Deskriptif**

Analisa deskriptif adalah teknik mengumpulkan data dan menyajikannya dalam bentuk tabel-tabel sehingga memberikan informasi yang berguna.

#### **3.4.2 Analisa Induktif**

Analisis induktif adalah suatu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian empiris yang telah dilakukan. Untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat, juga dilakukan secara kuantitatif dengan regresi linear berganda dengan SPSS 15 for windows. Dari regresi dihasilkan output statistik antara lain koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji T, uji F, koefisien korelasi dan koefisien regresi.

### 3.5 Uji Statistik

Damodar Gujarati (1995) menyatakan bahwa uji signifikansi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol dari sampel. Ide dasar yang melatarbelakangi pengujian signifikansi adalah uji statistik (estimator) dari distribusi sampel dari suatu statistik dibawah hipotesis nol. Keputusan untuk mengolah  $H_0$  dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada.

Uji statistik terdiri dari pengujian koefisien regresi parsial (uji t), pengujian koefisien regresi secara bersama-sama (uji F), dan pengujian koefisien determinasi (uji- $R^2$ ).

#### 3.5.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji signifikansi parameter individual (uji t) dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak terikat secara individual dan menganggap variabel lain konstan. Hipotesis yang digunakan:

1.  $H_0 : b_1 = 0$  tidak ada pengaruh antara variabel PDRB dengan kemiskinan.  
 $H_1 : b_1 < 0$  ada pengaruh negatif antara variabel PDRB dengan kemiskinan.
2.  $H_0 : b_2 = 0$  tidak ada pengaruh antara variabel APBD dengan kemiskinan.  
 $H_1 : b_2 < 0$  ada pengaruh negatif antara variabel APBD dengan kemiskinan.
3.  $H_0 : b_3 = 0$  tidak ada pengaruh antara variabel angkatan kerja dengan kemiskinan.

H1 :  $b_3 > 0$  ada pengaruh positif antara variabel angkatan kerja dengan kemiskinan.

Nilai t hitung dapat dicari dengan rumus:

$$t = \frac{Bi - Bi^*}{SE(Bi)} \dots\dots\dots (3.7)$$

dimana:

$\beta_i$  = parameter yang diestimasi.

$\beta_i^*$  = nilai hipotesis dari  $\beta_i$  ( $H_0 : \beta_i = \beta_i^*$ ).

$SE(\beta_i)$  = simpangan baku  $\beta_i$ .

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Jika t-hitung > t-tabel maka  $H_0$  ditolak, artinya salah satu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- b) Jika t-hitung < t-tabel maka  $H_0$  diterima, artinya salah satu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

### 3.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis yang digunakan:

1.  $H_0 : b_1, b_2, b_3 = 0$  semua variabel independen tidak mampu mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama

2. H1 : b1, b2, b3 ≠ 0 semua variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama.

Nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{1 - R^2 / (N - 1)} \dots \dots \dots (3.7)$$

dimana:

k = jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta

N = jumlah observasi

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:

- a) H0 diterima dan H1 ditolak apabila F hitung < F tabel, yang artinya variabel penjelas secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.
- b) H0 ditolak dan H1 diterima apabila F hitung > F tabel, yang artinya variabel penjelas secara bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

### 3.5.3 Uji Koefisien Determinasi (uji R<sup>2</sup>)

Imam Ghazali (2002) menyatakan bahwa koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai (R<sup>2</sup>) adalah antara nol dan satu. Nilai (R<sup>2</sup>) yang kecil

(mendekati nol) berarti kemampuan satu variabel dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunaan determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* ( $R^2$ ) pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik.

Nilai koefisien determinasi diperoleh dengan formula:

$$R^2 = \frac{\sum y^{*2}}{\sum y^2} \dots\dots\dots (3.7)$$

dimana:

$y^*$  = nilai y estimasi.

$y$  = nilai y actual.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **4.1 Deskripsi Obyek Penelitian**

##### **4.1.1 Kondisi Geografis**

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu dari 19 kabupaten yang ada di wilayah Propinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pasaman Barat mempunyai wilayah seluas 3887,77 Km yang terdiri atas 11 Kecamatan dan 19 Nagari 202 Jorong. Kabupaten Pasaman Barat dilintasi daerah khatulistiwa yaitu pada  $00^{\circ}03'$  LU sampai dengan  $00^{\circ}11'$  LS dan  $99^{\circ} 10'$  BT sampai dengan  $100^{\circ} 04'$  BT. Kabupaten Pasaman Barat terletak pada posisi  $00^{\circ}03'$  LU–  $00^{\circ}11'$ LS dan  $99^{\circ} 10'$ - $100^{\circ}04'$  BT dengan batas wilayah yaitu:

Bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Madina (Sumatera Utara).

Bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Palembayan dan Tanjung Mutiara (Kabupaten Agam, Sumatera Barat).

Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Pasaman, dan

Bagian Barat dengan Samudera Hindia.

Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat yang terluas adalah Kecamatan Koto Balingka 486,51 Km (12,51%), dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Sasak

Ranah pasisia 123,31 Km (3,17%). Untuk lebih jelasnya luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat.

**Table 4.1**  
**Luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat**

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah	Persentase Luas
1	Sungai Baremas	183,47	4,72
2	Ranah Batahan	429,22	11,04
3	Koto Balingka	486,51	12,51
4	Lembah Melintang	212,21	5,46
5	Sungai Aur	471,72	12,13
6	Gunung Tuleh	453,97	11,68
7	Pasaman	388,10	9,98
8	Sasak Ranah Pasisia	123,31	3,17
9	Luhak Nan Duo	278,00	7,15
10	Kinali	482,69	12,42
11	Talamau	378,57	9,74
Jumlah		3887,77	100,00

sumber: Pasaman Barat Dalam Angka 2006

## 4.2 Analisis Data

### 4.2.1 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup (*Word Bank*, 2004). Selain itu kemiskinan juga merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, kesehatan, pendidikan,



pengelolaan keuangan daerah, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Oleh karena itu, pemerintah sangat berupaya keras untuk mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut sehingga pembangunan dilakukan secara terus menerus termasuk dalam menentukan batas ukur untuk mengenali siapa si miskin tersebut. Berikut disajikan data tentang kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2000-2009.

**Table 4.2**  
**Persentase Kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat**  
**Tahun 2000 – 2009 (dalam satuan persen)**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Persentase Kemiskinan</b>	<b>Jumlah Angka kemiskinan</b>	<b>Pertumbuhan Kemiskinan (%)</b>
2000	316621	22%	66059	-
2001	316653	22%	68067	3,04
2002	316685	22%	70175	3,09
2003	316717	22%	71409	1,76
2004	320559	23%	72283	1,21
2005	328655	22%	73428	1,58
2006	336003	23%	75744	3,15
2007	327787	23%	76960	1,65
2008	333192	24%	78499	1,99
2009	338567	24%	79766	1,61
<b>Pertumbuhan Rata-rata</b>				<b>2,12</b>

*Sumber: Pasaman Barat Dalam Angka tahun 2003-2009*

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2000-2009 terus meningkat dari tahun ke tahun, ini di sebabkan pertumbuhan penduduk lebih cepat dari pertumbuhan kesediaan pangan di Kabupaten pasaman Barat yang mengakibatkan kemiskinan terus meningkat di Kabupaten Pasaman Barat.

#### **4.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Menurut BPS (2008), Produk Domestik Bruto (PDRB) merupakan penjumlahan nilai output bersih (barang dan jasa akhir) yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi, di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender). Kegiatan ekonomi yang dimaksud mulai kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan jasa-jasa. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui peranan dan potensi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Berikut disajikan data PDRB di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2000-2009.

**Tabel 4.3**  
**PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2000**  
**di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2000 – 2009 (dalam Juta Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB Atas Dalam Harga Konstan (2000)</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi (Persen)</b>
2000	Rp 1,750,090.69	-
2001	Rp 1,751,141.38	6,34
2002	Rp 1,752,192.70	6,35
2003	Rp 1,753,244.65	6,36
2004	Rp 1,866,612.80	6,47
2005	Rp 1,988,702.87	6,54
2006	Rp 2,115,152.39	6,36
2007	Rp 2,250,818.83	6,41
2008	Rp 2,394,934.54	6,40
2009	Rp 2,544,855.11	6,26
<b>Pertumbuhan Rata-rata</b>		<b>6,38</b>

*Sumber: Pasaman Barat Dalam Angka tahun 2003-2009*

Table 4.3 diatas menunjukkan bahwa perkembangan nilai Produk Domestik Bruto (PDRB) atas harga konstan di Kabupaten Pasaman Barat selama periode 2000-2005 menunjukkan pertumbuhan yang cenderung meningkat, tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi 6,47% dan tahun 2005 meningkat 6,54%. Ini berarti nilai tambah bruto produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang ada di Kabupaten Pasaman Barat terus meningkat. Namun peningkatan laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Pasaman Barat tidak diikuti dengan penurunan kemiskinan. Seperti halnya pertumbuhan PDRB di tahun 2005 sampai dengan tahun

penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Di karenakan di Kabupaten Pasaman Barat ini masih daerah pemekaran yang baru berkembang, yang menyebabkan masih ada ketimpangan pendapatan antar daerah di Kabupaten Pasaman Barat yang mengakibatkan kemiskinan masih meningkat, dan setelah tahap pembangunan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat akan menurun.

Yang mana menurut Kuznet dalam Tulus Tambunan (2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Selanjutnya menurut Hermanto S. dan Dwi W. (2006) mengungkapkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Karena dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat maka kemiskinan di suatu daerah dapat ditekan jumlahnya. Yang mana kemiskinan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Namun dalam penelitian penelitian Ravi Dwi wijayanto (2010), peningkatan laju PDRB tidak selalu di ikuti dengan penurunan kemiskinan.

#### **4.2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai

tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Departemen Dalam Negeri, 2006).

Dalam <http://www.ekonomirakyat.org>, penetapan prioritas anggaran pengeluaran daerah harus mengacu pada prinsip penganggaran terpadu (unified budgeting). Penganggaran terpadu adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

Sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, penyusunan APBD 2007 harus berdasar pada penganggaran terpadu. Penyusunan APBD dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja. Penyusunan APBD tersebut juga harus berorientasi pada anggaran berbasis kinerja.

Selanjutnya struktur APBD Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, APBD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Belanja daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut,

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 juga membedakan Belanja Daerah menjadi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sementara Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Made Suwandi, 2006).

Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Berikut disajikan data belanja langsung di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2000-2009.

**Tabel 4.4**  
**Belanja Langsung**  
**di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2000 – 2009 (dalam MilyarRupiah)**

Tahun	Belanja Langsung	Pertumbuhan (%)
2000	Rp 112,996,157,612.00	-
2001	Rp 120,016,487,360.00	6,21
2002	Rp 130,037,232,000.00	8,34
2003	Rp 139,058,400,000.00	6,94
2004	Rp 151,080,000,000.00	8,65
2005	Rp 165,878,282,777.00	9,79
2006	Rp 178,632,321,713.00	7,69
2007	Rp 193,147,816,718.00	8,13
2008	Rp 210,762,849,920.00	9,12
2009	Rp 231,042,361,722.00	9,62
<b>Pertumbuhan Rata-rata</b>		<b>8,27</b>

*Sumber: DPKAD Pasaman Barat tahun 2003-2009*

Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa belanja langsung di Kabupaten Pasaman Barat dari tahun 2000-2009 meningkat akibat meningkatnya biaya pelaksanaan

program dan kegiatan yang tercatat dalam belanja langsung dalam pengurangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat.

Menurut Abena D. Oduro (2001), menyatakan pengeluaran pemerintah memiliki dampak penurunan kemiskinan melalui: penyediaan infrastruktur dan pelayanan untuk orang miskin, menciptakan kondisi yang akan meningkatkan kemampuan masyarakat miskin untuk mengakumulasi asset.

Selanjutnya menurut Gazi Mainul Hassan (2005), ada hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pengurangan kemiskinan. Di mana pengeluaran pemerintah mengurangi kemiskinan melalui pembinaan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan upah nasional. Pengeluaran pemerintah seperti sektor pertanian dan pembangunan pedesaan, pendidikan dan kesehatan secara langsung pro-miskin, sektor tersebut membantu untuk mengurangi kemiskinan nasional dan menghasilkan pertumbuhan jangka panjang untuk sumber daya di masa depan.

#### **4.2.4 Angkatan Kerja**

Menurut Dumairy (1996), tenaga kerja (*manpower*) dibedakan menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja (*Labor force*) dan bukan angkatan kerja. Selanjutnya, angkatan kerja dibedakan pula menjadi dua subkelompok yaitu pekerja dan pengangguran. Yang dimaksud dengan pekerja ialah orang-orang yang mempunyai pekerjaan, mencakup orang yang mempunyai pekerjaan dan memang sedang bekerja,

serta orang yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara waktu kebetulan sedang tidak bekerja.

Selanjutnya menurut Biro Pusat Statistik (BPS) pengertian bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh upah atau memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara kontinyu dalam seminggu yang lalu.

Sedangkan pengangguran adalah meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran terhadap 100 penduduk yang masuk kategori angkatan kerja (BPS, 2008). Tingkat pengangguran sangat erat hubungannya dengan laju pertumbuhan penduduk. Dengan laju pertumbuhan yang tinggi akan meningkatkan jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja) yang kemudian besarnya angkatan kerja ini dapat menekan ketersediaan lapangan kerja di pasar kerja. Sedangkan angkatan kerja sendiri terdiri dari dua komponen yaitu orang yang menganggur dan orang yang bekerja. Apabila mereka tidak bekerja konsekuensinya adalah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan baik, kondisi seperti ini membawa dampak bagi terciptanya dan membengkaknya jumlah kemiskinan yang ada. Berikut disajikan data angkatan kerja di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2000-2009.



Tabel 4.5

**Jumlah Angkatan Kerja di Kabupten Pasaman barat  
Tahun 2000-2009**

Tahun	Angkatan Kerja	Pertumbuhan Angkatan Kerja (%)
2000	132588	-
2001	134470	1,41
2002	136366	1,40
2003	138274	1,39
2004	140195	1,38
2005	144244	2,80
2006	145789	1,07
2007	149327	2,43
2008	158945	6,44
2009	169487	6,63
<b>Pertumbuhan Rata-rata</b>		2,50

*Sumber: Pasaman Barat Dalam Angka tahun 2003-2009*

Tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pasaman Barat dari tahun 2000-2009 terus meningkat. Di mana pertumbuhan rata-rata angkat kerja di Kabupaten Pasaman Barat dari tahun 2000-2009 mencapai 2,50% sedangkan persentase kemiskinan terus meningkat ini menyebabkan lapangan kerja yang di sediakan tidak sesuai dengan pertumbuhan angkatan kerja, maka menimbulkan pengangguran yang mengakibatkan meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat.

Menurut Lincoln Arsyad (1997), pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja, Ada beberapa faktor mengapa hal tersebut lebih

menonjol atau penting bagi negara berkembang. Pertama, pertumbuhan penduduk di negara berkembang cenderung tinggi, sehingga cenderung melebihi pertumbuhan kapital. Kedua, demografi profil lebih muda, sehingga lebih banyak penduduk yang masuk ke lapangan kerja. Ketiga, struktur industri di negara berkembang, yang cenderung mempunyai tingkat diversifikasi kegiatan ekonomi rendah, serta tingkat keterampilan penduduk yang belum memadai, membuat usaha penciptaan lapangan kerja menjadi semakin kompleks.

Selanjutnya menurut Michael P. Todaro (2000), tingginya angka kelahiran dapat menjadikan beban tanggungan bagi angkatan kerja produktif. Hal ini dianggap sebagai penyebab pokok terjadinya kemiskinan, standar hidup yang rendah (pendapatan rendah, fasilitas perumahan tidak memadai, pendidikan terbatas, kematian tinggi, umur pendek, harapan kosong, perasaan kacau dan putus asa), kekurangan gizi, kesehatan yang buruk, degradasi lingkungan dan masalah sosialnya.

**BAB V**  
**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**5.1 Analisis Regresi**

**5.1.1 Interpretasi Hasil Penelitian**

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel independent APBD (X1), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (X2), dan angkatan kerja (X3) terhadap Kemiskinan (Y).

Dari hasil regresi data-data yang ada di lampiran hasil analisis regresi diperoleh hasil yang dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut:

**Tabel 5.1**

**Analisis regresi Linier Berganda Antara Variabel Independen PDRB (X1), APBD (X2) dan Angkatan Kerja (X3) Terhadap Kemiskinan (Y) di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2000-2009**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.846	1.370		3.538	.012
PDRB	2.864	.639	.7178	4.483	.004
APBD	-2.135	.588	-.6698	-1.632	.011
Angkatan Kerja	.469	.339	.472	1.385	.215

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Hasil analisis regresi linier sederhana di atas , dapat disusun dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{Log KM} = 4,846 + 2,864 \text{ Log X1} - 2,135 \text{ Log X2} + 0,469 \text{ Log X3}$$

$$\text{T-test} \quad (4,48) \quad (-1,63) \quad (1,38)$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koefisien regresi PDRB (X1) sebesar 2,86 menunjukkan besarnya pengaruh PDRB terhadap kemiskinan (Y). Dimana PDRB berpengaruh positif terhadap kemiskinan yang dilihat dari tanda positif koefisien regresinya. Artinya setiap peningkatan 1 persen PDRB akan menambah 2,86 persen kemiskinan.
2. Koefisien regresi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau (X2) adalah -2,13. Dimana APBD berpengaruh negatif terhadap kemiskinan yang dilihat dari tanda negatif koefisien regresinya. Artinya setiap penambahan 1 persen APBD akan mengurangi 2,13 persen kemiskinan.
3. Koefisien regresi angkatan kerja (X3) sebesar 0,46 menunjukkan besarnya pengaruh angkatan kerja terhadap kemiskinan (Y). Dimana angkatan kerja berpengaruh positif terhadap kemiskinan yang dilihat dari tanda positif koefisien regresinya. Artinya setiap penambahan 1 persen angkatan kerja akan menambah kemiskinan 0,46 persen kemiskinan.

### 5.1.2 Uji Signifikansi parameter Individual (Uji t)

Uji t adalah pengujian koefisien regresi secara individu dan untuk mengetahui dari masing-masing variabel dalam mempengaruhi variabel dependen, dengan menganggap variabel lain konstan atau tetap variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ , dan begitu juga sebaliknya, masing-masing variabel independen secara individu tidak mempengaruhi variabel dependen jika  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ . Hipotesis yang digunakan:

Untuk variabel PDRB

$H_0 : b_1 = 0$  tidak ada pengaruh antara variabel PDRB dengan kemiskinan.

$H_1 : b_1 < 0$  ada pengaruh negatif antara variabel PDRB dengan kemiskinan.

Untuk variabel APBD

$H_0 : b_2 = 0$  tidak ada pengaruh antara variabel APBD dengan kemiskinan.

$H_1 : b_2 < 0$  ada pengaruh negatif antara variabel APBD dengan kemiskinan.

Untuk variabel angkatan kerja

$H_0 : b_3 = 0$  tidak ada pengaruh antara variabel jumlah angkatan kerja dengan kemiskinan.

$H_1 : b_3 > 0$  ada pengaruh positif antara variabel jumlah angkatan kerja dengan kemiskinan.

Dalam regresi pengaruh PDRB, APBD dan angkatan kerja terhadap kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2000 - 2009, dengan  $\alpha = 5$  persen dan *degree of freedom* ( $df$ ) = 6 ( $n-k=9-3$ ), maka diperoleh nilai t-tabel sebesar 2,47.

Untuk variabel PDRB nilai perhitungan t-testnya adalah sebesar 4,48, hal ini berarti nilai  $t\text{-test} > t\text{-tabel}$  ( $4,48 > 2,47$ ). Karena  $t\text{-test} > t\text{-tabel}$  maka hasil perhitungan menunjukkan hubungan yang positif yang artinya  $H_0$  dapat ditolak. Hal ini disebabkan di Kabupaten Pasaman Barat ini masih daerah pemekaran yang baru berkembang, yang menyebabkan masih ada ketimpangan pendapatan antar daerah di Kabupaten Pasaman Barat yang mengakibatkan kemiskinan masih meningkat, dan setelah tahap pembangunan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat akan menurun.

Untuk variabel APBD nilai perhitungan t-testnya adalah sebesar -1,63, hal ini berarti nilai  $t\text{-test} < t\text{-tabel}$  ( $-1,63 < -2,47$ ). Karena  $t\text{-test} < t\text{-tabel}$  maka hasil perhitungan menunjukkan hubungan negatif yang artinya menerima  $H_0$ . Hal tersebut disebabkan, bahwa APBD di Kabupaten Pasaman Barat tidak disebarkan secara keseluruhan lapisan masyarakat, tetapi masih dinikmati oleh birokrasi di Kabupaten Pasaman Barat yang menyebabkan kemiskinan masih meningkat.

Untuk variabel angkatan kerja nilai perhitungan t-testnya adalah sebesar 1,38, hal ini berarti nilai  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$  ( $1,38 < 2,47$ ) yang artinya menerima  $H_0$ . Karena di Kabupaten Pasaman Barat ketersediaan lapangan kerja tidak sesuai dengan angkatan kerja yang ada, yang menyebabkan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat meningkat.

### 5.1.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di dalam model dapat dilakukan dengan uji simultan (uji F). Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dari regresi pengaruh PDRB, APBD dan angkatan kerja terhadap kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2000 - 2009 yang menggunakan taraf keyakinan 95 persen ( $\alpha = 5$  persen), dengan *degree of freedom for numerator* (dfn) = 2 ( $k-1 = 3-1$ ) dan *degree of freedom for denominator* (dfd) = 6 ( $n-k = 9-3$ ), maka diperoleh F-tabel sebesar 8,94. Dari hasil regresi pengaruh PDRB, APBD dan angkatan kerja terhadap kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2000 - 2009 diperoleh F-statistik sebesar 66,53 sedangkan nilai probabilitas F-statistik 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen ( $F_{hitung} > F_{tabel}$ ).

### 5.1.4 Uji Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variable dependen.

Dari hasil regresi pengaruh PDRB, APBD dan angkatan kerja terhadap kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2000 - 2009 pada Tabel 5.2 diperoleh nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,971. Hal ini berarti sebesar 97,1 persen variasi kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat dapat dijelaskan oleh variasi tiga variable independennya yakni PDRB (PDRB), APBD (APBD), AK (angkatan kerja). Sedangkan sisanya sebesar 2,9 persen dijelaskan oleh variable lain di luar model. Data yang di lampirkan hasil analisis regresi diperoleh hasil dapat dilihat Tabel 5.2 berikut:

**Tabel 5.2**  
**Koefisien korelasi PDRB, APBD dan Angkatan Kerja Terhadap**  
**Kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat**  
**Tahun 2000-2009**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.985 <sup>a</sup>	.971	.956	.00702378	.971	66.530	3	6	.000

a. Predictors: (Constant), ANGKATAN KERJA, PDRB, APBD



## 5.2 Implikasi kebijakan

Setelah dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat, implikasi kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah daerah yang bersangkutan dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah:

- 1) Di harapkan kepada pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melakukan pemerataan pembangunan agar tidak terjadi ketimpangan pendapatan antar daerah di Kabupaten Pasaman Barat, yang dapat mengurangi kemiskinan.
- 2) Perlunya mengalokasikan APBD yang sesuai dengan kebutuhan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat yang tidak hanya di nikmati oleh birokrasi.
- 3) Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat perlu melakukan program KB yang dapat mencegah meningkatnya angka kelahiran yang dapat menyebabkan meningkatnya kemiskinan karena banyaknya beban tanggungan.
- 4) Pemerintah perlu membuka lapangan kerja yang banyak menyerap angkatan kerja supaya mengurangi pengangguran yang menyebabkan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat tidak meningkat.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh variabel PDRB, APBD dan angkatan kerja terhadap kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2000 - 2009. Berdasar hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) PDRB, APBD dan angkatan kerja terhadap kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan bahwa besarnya nilai  $R^2$  cukup tinggi yaitu 0,971. Nilai ini berarti bahwa model yang dibentuk cukup baik dimana 97,1 persen variasi variabel dependen kemiskinan dapat dijelaskan dengan baik oleh ketiga variabel independen yakni PDRB, APBD dan angkatan kerja. Sedangkan 2,9 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya.
2. Variabel PDRB mempunyai pengaruh positif terhadap kemiskinan. Artinya, apabila PDRB naik sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan kemiskinan sebesar 2,86 persen.
3. Variabel APBD mempunyai pengaruh negatif terhadap kemiskinan, dimana memiliki nilai koefisien  $\beta$  sebesar - 2,13. Artinya apabila APBD naik sebesar 1 persen, maka akan mungurangi kemiskinan sebesar 2,13 persen.

4. Variabel angkatan kerja mempunyai pengaruh positif terhadap kemiskinan, dimana memiliki nilai koefisien  $\beta$  sebesar 0,46. Artinya apabila angkatan kerja naik sebesar 1 persen, maka akan mungurangi kemiskinan sebesar 0,46 persen.
5. Berdasarkan perhitungan dengan uji F diketahui bahwa F-hitung sebesar (66,53) > F-tabel (8,94), sehingga inferensi yang diambil adalah menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Dengan kata lain, hipotesis yang berbunyi “Ada pengaruh antara variabel PDRB, APBD dan angkatan kerja secara simultan terhadap kemiskinan”, diterima pada tingkat kepercayaan 95%.

## 6.2 Keterbatasan

Kelemahan dan kekurangan yang ditemukan setelah analisis dan interpretasi dalam penelitian ini adalah data time series yang di gunakan masih terlalu pendek. Sehingga mempengaruhi hasil signifikansi variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Hal ini perlu dilakukan penelitian kembali dalam permasalahan yang sama.

## 6.3 Saran

1. PDRB memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan, sehingga diharapkan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat meningkatkan total produksi barang PDRB dengan melibatkan masyarakat miskin yang masih produktif.
2. Pemerintah perlu mengalokasikan APBD terhadap sektor-sektor ekonomi yang dapat menampung tenaga kerja yang masih miskin.

3. Angkatan kerja mempunyai pengaruh positif terhadap kemiskinan, diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menciptakan lapangan kerja terutama yang padat karya oleh pemerintah dan swasta, supaya mengurangi kemiskinan di Pasaman Barat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2001, "*Manajemen Keuangan Daerah*", Penerbit: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta.
- Abena D. Oduro, 2001, *A Note On Public Expenditure And Poverty Reduction In Ghana*, Organised by ISSER and CEPA, in Collaboration with Cornell University.
- Ardi Hamzah, 2006, *Analisa Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan: pendekatan analisis jalur (studi pada 29 kabupaten dan 9 kota di propinsi jawa timur periode 2001 – 2006)*, Skripsi: Universitas Trunojoyo.
- Boediono, 1999, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2003-2009, *Pasaman Barat Dalam Angka 2003-2009*, Pasaman: Badan Pusat Statistik.
- Damodar Gujarati, 1995, *Ekonometri Dasar Terjemahan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Daeng Sudirwo, 1980, *Keuangan Daerah*, PT.Graedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Damodar Gujarati, 1995, *Ekonometri Dasar Terjemahan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Damodar Gujarati , 2003, *Basic Econometrics Fourth Edition*, Penerbit United States Military Academy, New York.
- Deny Tisna A., 2008, *Pengaruh Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran terhadap tingkat Kemiskinan di Indonesiatahun 2003-2004*. Kumpulan Skripsi UNDIP: Semarang.
- Departemen Dalam Negeri, 2006, *Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Dian Octaviani, 2001, *Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia :Analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke*, **Media Ekonomi**, Hal. 100-118, Vol. 7, No. 8.
- Didit Purnomo, 2000, *Distribusi Pendapatan di Indonesia : Proses Pemerataan dan Pemiskinan*, **Jurnal Ekonomi Pembangunan**, Hal. 47 - 59, Vol. 1, No. 1

Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2003-2009, Pasaman: DPKAD.

Dumairy, 1996, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga: Jakarta.

Elfindri, Nasri Bachtiar, 2004, *Ekonomi Ketenagakerjaan*, auniversitas Andalas : Padang.

Gazi Mainul Hassan, *Public Expenditure, employment and Poverty in Bangladesh: An Empirical Analysis*.

Hardi Hamzah, 2006, "*Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan*", Fakultas ekonomi Turnojoyo.

Harlem Siahaan, 1995, *Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi*, Prisma, Hal. 17-31, No. 1.

Hendra Esmara, 1986, *Perencanaan dan pembngunan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia.

Hermanto S., Dwi W., 2006, *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Penduduk Miskin di Indonesia : Proses Pemerataan dan Pemiskinan*, Direktur Kajian Ekonomi, Institusi Pertanian Bogor.

Imam Ghozali, 2002, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Ismawanto, 2009, *Ekonomi 2 : Untuk SMA dan MA Kelas XI*, Jakarta : Pusat perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, h. 27 – 29.

Lincoln Arsyad, 1997, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Ketiga, Penerbit BP STIE YKPN, Yogyakarta.

Made Suwandi (a) "*Gambaran Umum Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*"

Marzuki, 2005, *Metodologi Riset*, Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.

Michael P. Todaro, 1994, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Kedua, Terjemahan Haris Munandar, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Michael P. Todaro, 2000, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh, Terjemahan Haris Munandar, Penerbit Erlangga, Jakarta.

- Muana Nang, 2001, *Makro Ekonomi*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mudrajad Kuncoro, 1997, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Edisi Ketiga, Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Mudrajad Kuncoro, 2001, *Metode Kuantitatif*, Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Mudrajad Kuncoro, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mudrajad Kuncoro, 2006, *Strategi Bagaimana Membangun Keunggulan Kompetitif*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Panjar Simatupang dan Saktyanu K. Dermoredjo, 2003, *Produksi Domestik Bruto, Harga, dan Kemiskinan, Media Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Hal. 191 - 324, Vol. 51, No. 3.*
- Rasidin S., Bonar S., 2009, *Dampak Infestasi Sumberdaya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia, Prisma, Hal. 17 -31, No. 1.*
- Sadono Sukirno. 1983. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP Universitas Indonesia.
- Sadono Sukirno, 2000, *Makro Ekonomi Modern*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salmon A.Situmeang, 2006, *Peranan Dana Alokasi Umum Sebagai Dana Perimbangan Dalam APBD Kota Pekalongan 2003-2005 Perspektif UU No 22/1999 Dan UU No 33/2004*, Tesis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sumitro Djojohadikusumo, 1995, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Sumitro Djojohadikusumo, 1944, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Supranto, J. 1997. *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Tulus H. Tambunan, 2001, *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Tulus H. Tambunan, 1996, *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Usman,dkk., 2009, *Analisis Determinan Kemiskinan sebelum dan Sesudah Desentralisasi Fiskal*, Fakultas Ekonomi : Intitusi Pertanian Bogor.

UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

UU No 22 Tahun 1992 Tentang Pemerintah Daerah.

UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah

Wahyu Adji,dkk, 2005, *Ekonomi SMA untuk kelas XII*, Penerbit Erlangga.

[www.google.com/artikel kemiskinan](http://www.google.com/artikel/kemiskinan)

<http://agen.multiply.com>

<http://www.bbc.co.uk/indonesia>

<http://www.bimakab.go.id/index.php?pilih=hal&id=31>

<http://www.ekonomirakyat>.

[www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)





LAMPIRAN

KM	PDRB	APBD	AK	LOG KM	LOG PDRB	LOG APBD	LOG AK
19	1428510	112,996,157,612	132588	1.2787536	6.154883159	11.05306368	5.12250422
20	1529454	120,016,487,360	134470	1.30103	6.184536282	11.07924091	5.128625405
21	1637531	130,037,232,000	136366	1.32221929	6.214189399	11.11406772	5.134706102
22	1753245	139,058,400,000	138274	1.34242268	6.243842522	11.14319723	5.140740526
23	1866622	151,080,000,000	140195	1.36172784	6.271056334	11.17920698	5.146732525
22	1988703	165,878,282,777	144244	1.34242268	6.2985699	11.21978953	5.159097757
23	2115152	178,632,321,713	145789	1.36172784	6.325341662	11.25196004	5.163724757
23	2250819	193,147,816,718	149327	1.36172784	6.35234054	11.2858898	5.17413834
24	2394935	210,762,849,920	158945	1.38021124	6.379293647	11.32379406	5.201246871
24	2544855	231,042,361,722	169487	1.38021124	6.405663061	11.36369162	5.229136393



## Regression

### Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
KEMISKINAN	1.3432454E0	.03357005	10
PDRB	6.28297165E0	.084117590	10
APBD	1.12013902E1	.105296101	10
ANGKATAN KERJA	5.16006529E0	.033784803	10

### Correlations

		KEMISKINAN	PDRB	APBD	ANGKATAN KERJA
Pearson Correlation	KEMISKINAN	1.000	.937	.918	.828
	PDRB	.937	1.000	.998	.943
	APBD	.918	.998	1.000	.957
	ANGKATAN KERJA	.828	.943	.957	1.000
Sig. (1-tailed)	KEMISKINAN	.	.000	.000	.002
	PDRB	.000	.	.000	.000
	APBD	.000	.000	.	.000
	ANGKATAN KERJA	.002	.000	.000	.
N	KEMISKINAN	10	10	10	10
	PDRB	10	10	10	10
	APBD	10	10	10	10
	ANGKATAN KERJA	10	10	10	10

UNIVERSITAS ANDALAS

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.985 <sup>a</sup>	.971	.956	.00702378	.971	66.530	3	6	.000

a. Predictors: (Constant), ANGKATAN KERJA, PDRB, APBD

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.010	3	.003	66.530	.000 <sup>a</sup>
	Residual	.000	6	.000		
	Total	.010	9			

a. Predictors: (Constant), ANGKATAN KERJA, PDRB, APBD

b. Dependent Variable: KEMISKINAN



**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	95% Confidence Interval for B	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1	(Constant)	4.846	1.370		3.538	.012	1.494	8.197
	PDRB	2.864	.639	7.178	4.483	.004	1.301	4.428
	APBD	-2.135	.588	-6.698	-1.632	.011	-3.574	-.697
	ANGKATAN KERJA	.469	.339	.472	1.385	.215	-.359	1.297

a. Dependent Variable: KEMISKINAN

**Coefficient Correlations<sup>a</sup>**

Model			ANGKATAN	PDRB	APBD
			KERJA		
1	Correlations	ANGKATAN KERJA	1.000	.705	-.788
		PDRB	.705	1.000	-.991
		APBD	-.788	-.991	1.000
1	Covariances	ANGKATAN KERJA	.115	.152	-.157
		PDRB	.152	.408	-.372
		APBD	-.157	-.372	.346

a. Dependent Variable: KEMISKINAN